

PANDUAN PENULISAN KARYA ILMIAH



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN
MASYARAKAT DESA
"APMD"

**PANDUAN PENULISAN
KARYA ILMIAH**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN
MASYARAKAT DESA “APMD”**

YOGYAKARTA

2021

KATA PENGANTAR

Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah ini hadir berdasarkan pengalaman dan pergulatan dalam pembimbingan terhadap mahasiswa S1. Mahasiswa sering kesulitan dalam membuat proposal penelitian dan merumuskan masalah. Penyebabnya mahasiswa tidak banyak membaca jurnal-jurnal dan buku-buku sesuai topik penelitian. Mahasiswa juga mengalami kesulitan dalam membuat kajian literatur, hal ini menyebabkan mereka tidak bisa membuat argumen dalam karya ilmiah. Karya ilmiah yang baik harus memiliki argumen yang kuat yang menjadikan tulisan tersebut "*nendang*" dan menjawab rumusan masalah.

Selain itu mahasiswa juga belum mampu mengolah data primer, sekunder dan memvalidasi data tersebut, yang pada gilirannya dia juga sulit menganalisis temuan lapangan yang dipadukan dengan dasar teori (konsep) untuk menjawab rumusan masalah. Mahasiswa belum menguasai konsep (teori) secara mendalam, karena lemahnya daya baca. Mahasiswa kurang mampu mengkritisi teori dan menemukan *novelty* (temuan baru). *Novelty* atau temuan baru didasarkan pada konsepsi yang dipadukan dengan data lapangan. Sebuah karya ilmiah yang baik harus ada *novelty*, sebab tanpa *novelty* karya tersebut mengulang tulisan yang sudah pernah ada. Untuk menemukan *novelty*, mahasiswa harus banyak membaca jurnal-jurnal dan berani mengkritisi konsepsi teori yang tidak sesuai dengan data lapangan.

Permasalahan mahasiswa belum mampu menulis karya ilmiah yang berkualitas bersumber dari tidak adanya kemauan untuk tahu dan belajar secara mandiri (otodidak). Bila mahasiswa memiliki keinginan yang kuat untuk tahu dan secara mandiri mencari sumber informasi melalui internet, perpustakaan dan diskusi kelompok maka mahasiswa akan menjadi manusia pembelajar. Dibutuhkan kemauan baca yang kuat dan haus untuk belajar mandiri setiap hari, sehingga membaca menjadi gaya hidup. Membaca, berdiskusi dan menulis haruslah menjadi gaya hidup mahasiswa. Dengan demikian mahasiswa akan mampu menulis karya ilmiah yang berkualitas dan menjadi agen perubahan sosial.

Kami mengucapkan terimakasih kepada para penulis: Sutoro Eko Yunanto, Fatih Gama Abisono Nasution, Yonatan Hans Luter Lopo, Mohamad Firdaus dan Minardi. Kiranya buku ini menjadi pencerah bagi mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah dengan perspektif Mazhab Timoho. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Safitri Endah Winarti yang telah mengoreksi naskah ini. Kritik dan saran untuk perbaikan buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah ini kami nantikan dari semua dosen dan mahasiswa. Kritik dan saran bisa dikirim via email: ip@apmd.ac.id

Yogyakarta, 1 Juli 2021

Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Mengenal Karya Ilmiah.....	1
B. Ciri-Ciri Karya Ilmiah.....	3
C. Etika Penulisan	6
BAB II. STRUKTUR DAN BENTUK KARYA	
ILMIAH.....	10
A. Jenis Struktur Penulisan	10
B. Bentuk Karya Ilmiah	18
BAB III. PENGORGANISASIAN KARYA	
ILMIAH	29
A. Menyusun Proposal Penelitian.....	29
B. Rancangan Penelitian	46
C. Argumentasi Karya Ilmiah	52
BAB IV. PEMETAAN PENELITIAN ILMU	
PEMERINTAHAN	61
A. Government	61
B. Governing	64
C. Governability	68

D. Governance	72
E. Governmentality	76
BAB V. MEMILIH DAN MENULISKAN	
REFERENSI	83
A. Cara Penulisan Sumber Kutipan	84
B. Aturan Penulisan Daftar Pustaka/Referensi.	86
C. Penulisan Daftar Pustaka	88
D. Penulisan Daftar Pustaka jika Penulis Sama	104
DAFTAR PUSTAKA	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Mengenal Karya Ilmiah

Secara umum suatu karya tulis dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu karya tulis Ilmiah dan karya tulis Populer. Swales dan Feak (2009) menyatakan bahwa tulisan akademik memiliki beberapa karakteristik yang khas dan spesifik seperti tujuan dan manfaat tulisan, pengorganisasian tulisan yang baik, gaya dan alur tulisan, serta mempertimbangkan tipologi pembaca. Selain itu, tulisan akademik harus memiliki argumen sebagai roh yang menjiwai seluruh kesatuan tulisan. Prinsip-prinsip inilah yang membedakan tulisan akademik dengan tulisan populer di media cetak seperti koran dan majalah, atau di media *online* seperti situs *blog*, situs media sosial seperti *Facebook*, dan *Twitter*, serta situs media komunitas seperti *kaskus* dan lain-lain. Brotowidjoyo (Warsiman, 2013:115) juga menyatakan bahwa karya ilmiah merupakan tulisan yang menyajikan ilmu pengetahuan berupa fakta umum dan ditulis melalui serangkaian metodologi

penulisan yang baik dan benar. Tidak semua karya tulis dapat disebut sebagai karya ilmiah. Sebab tidak semua proses berpikir adalah berpikir ilmiah.

Derajat keilmiahannya sebuah tulisan sesungguhnya tidak ditentukan oleh berapa banyaknya referensi yang digunakan oleh penulis, atau seberapa banyak jumlah kutipan para ahli yang disertakan dalam suatu tulisan. Prinsip akademik memang mengharuskan seorang penulis menyebutkan sumber pengetahuan secara jujur, sebagaimana lazimnya dicantumkan dalam daftar pustaka, namun tingkat keilmiahannya sebuah tulisan juga dapat dilihat dari keberanian penulis membangun argumentasi secara logis, sistematis, dan koherensif berdasarkan teori, data, dan metodologi yang digunakan oleh penulis.

Dalam dunia Pendidikan, karya tulis ilmiah dapat didefinisikan sebagai produk yang dihasilkan dari proses berpikir ilmiah, yang didasari oleh sikap ilmiah, serta dikerjakan dengan metode yang bersifat ilmiah. Proses berpikir, sikap, dan metode adalah tiga aspek mendasar yang membedakan karya yang bersifat ilmiah dengan karya yang non ilmiah.

Pada bagian berikut akan dijelaskan lebih detail mengenai ciri-ciri karya ilmiah.

B. Ciri-Ciri Karya Ilmiah

Secara umum, sebuah karya tulis yang ilmiah dapat dilihat dari beberapa karakteristik di bawah ini:

1. Objektif

Keobjektifan ini dapat dilihat dari setiap fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, dan tidak dimanipulasi. Setiap pernyataan atau kesimpulan yang disampaikan berdasarkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan serta didialogkan dengan teori yang dipakai. Dengan demikian, siapa pun dapat memverifikasi kebenaran dan keabsahannya.

2. Sistematis

Karya ilmiah dikatakan sistematis apabila mengikuti pola pengembangan tertentu, misalnya pola urutan, klasifikasi, kausalitas, dan sebagainya. Dengan cara demikian, pembaca akan bisa mengikutinya dengan mudah alur uraiannya. Secara umum, sistematika karya ilmiah terdiri atas

tiga (3) bagian yakni pendahuluan, isi, dan penutup. Ketiga bagian tersebut dapat dielaborasi menjadi banyak sub bagian sesuai kebutuhan penulis sehingga mempermudah pembaca dalam memahami isi tulisan.

3. Logis dan Argumentatif

Kelogisan karya ilmiah bisa dilihat dari pola nalar yang digunakannya. Pola nalar suatu karya ilmiah biasanya bersifat induktif atau deduktif. Kalau bermaksud menyimpulkan suatu fakta atau data, maka seringkali digunakan pola induktif. Sebaliknya, kalau bermaksud membuktikan suatu teori atau hipotesis, digunakan pola deduktif.

4. Memiliki Tujuan yang jelas

Kejelasan tujuan tulisan biasanya dapat terlihat sejak awal. Tulisan akademik dalam kajian ilmu sosial dan politik berdasarkan 2 (dua) tujuan yaitu memberikan informasi (*to inform*) dan membujuk (*to persuade*). Tulisan yang memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi dibagi lagi menjadi tiga, yang disebut dengan eksposisi, deskripsi, dan narasi (Kane, 2000).

Tulisan eksposisi di antaranya dapat menjelaskan posisi pemikiran penulis terhadap suatu isu yang sedang dibahas. Tulisan deskripsi berhubungan dengan persepsi, terutama persepsi visual. Tulisan narasi berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang saling berhubungan dalam kaitan waktu. Sementara itu Tulisan yang bertujuan persuasif biasanya berisi promosi gagasan tertentu dari penulis yang berusaha meyakinkan pembaca untuk menerima gagasannya terkait topik yang dibahas.

5. Bahasa Formal

Karya ilmiah yang baik menggunakan bahasa formal yang mudah dipahami oleh pembaca. Tingkat formalitas dalam konteks ini yaitu sesuai dengan konteks tempat dan waktu karya tersebut dihasilkan dan dipublikasikan. Bahasa yang formal tidak berarti harus kaku. Bahasa yang formal dalam konteks ini adalah bahasa yang mampu dipahami oleh banyak orang, terutama mempertimbangkan tipologi pembaca yang menjadi pengguna dari karya ilmiah yang dihasilkan.

C. Etika Penulisan

Semua karya tulis ilmiah juga terikat oleh semacam kode etik yang patut diperhatikan. Kode etik dalam penulisan ilmiah merupakan seperangkat aturan-aturan maupun larangan yang perlu diperhatikan dan ditaati dalam penulisan karya ilmiah. Secara umum etika dalam penyusunan karya tulis ilmiah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penulisan harus dilakukan secara bertanggung jawab, cermat dan seksama
- 2) Karya tulis ilmiah harus orisinal, bukan jiplakan dari hasil karya orang lain
- 3) Menjaga kebenaran, fakta dan manfaat yang disampaikan
- 4) Bertanggung jawab atas tulisannya dan mampu menerima saran dan kritik yang diterima dari pembaca, reviewer, maupun editor
- 5) Menyadari secara sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah.

Etika penulisan ilmiah memiliki tujuan untuk menegakkan etika dan moral akademik, menjamin akurasi temuan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, sekaligus melindungi karya ilmiah dari kemungkinan pemalsuan dan penyalah-gunaan data oleh orang lain. Dalam proses penulisan karya ilmiah, ada beberapa jenis pelanggaran kode etik yang sering dilakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, karena itu perlu dihindari.

1. Fabrikasi

Fabrikasi (*fabrication*) adalah bentuk pelanggaran etika penulisan dalam bentuk mengarang, membuat, atau “mempercantik” data atau hasil penelitian tanpa adanya proses ilmiah sebelumnya, untuk dilaporkan atau dipublikasikan. Data atau hasil penelitian dikarang atau dibuat-buat dan dicatat dan/atau diumumkan tanpa pembuktian bahwa peneliti yang bersangkutan telah melakukan proses penelitian. Oleh karenanya, penting bagi peneliti untuk membuat catatan penelitian (*logbook*) secara cermat sebagai bukti tidak melakukan fabrikasi.

2. Falsifikasi

Falsifikasi adalah bentuk pelanggaran dalam bentuk pemalsuan data atau hasil penelitian dengan mengubah atau melaporkan secara salah, termasuk membuang data yang bertentangan secara sengaja untuk mengubah hasil akhir penelitian. Pemalsuan juga meliputi manipulasi bahan dan peralatan penelitian (termasuk instrumen penelitian) dan proses penelitian. Falsifikasi juga termasuk menghilangkan atau menambahkan sebagian hasil penelitian tanpa adanya justifikasi ilmiah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, lebih akurat atau lebih lengkap, sesuai keinginan penulis.

3. Plagiasi

Plagiarisme adalah bentuk pelanggaran dalam bentuk pencatutan gagasan, ide atau kata-kata orang lain yang digunakan tanpa memberi penghargaan atau pengakuan atas sumber utamanya. Plagiasi bisa terjadi dalam penulisan proposal maupun penulisan hasil penelitian. Jenisnya bisa mencakup perbuatan seperti mencuri gagasan, pemikiran, proses dan hasil penelitian orang lain, baik dalam bentuk data atau kata-kata, termasuk bahan yang diperoleh dalam

penelitian terbatas yang bersifat rahasia.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI N0.17 Tahun 2010, plagiat didefinisikan sebagai perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyertakan sumber utama secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Exploitation

Bentuk Pelanggaran Ilmiah (LIPI, 2013) *Exploitation* pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti, misal : peneliti senior memeras tenaga peneliti junior dan pembantu penelitian untuk mencari keuntungan dan kepentingan pribadi.

BAB II

STRUKTUR DAN BENTUK KARYA ILMIAH

Esensi menulis adalah menyampaikan gagasan atau ide. Berbagai informasi yang dimiliki perlu disusun dalam struktur dan bentuk yang jelas sehingga gagasan atau ide dapat diterima oleh pembaca. Dengan demikian, kejelasan struktur dan bentuk menjadi determinan penting yang menentukan kualitas sebuah karya ilmiah. Bab ini membahas struktur tulisan akademik yang umum dipakai dalam menulis karya ilmiah. Dalam menyajikan karya akademik, para mahasiswa dapat menyajikan karyanya melalui cara kronologi, deskripsi, sebab-akibat, perbandingan dan evaluasi. Pada bagian kedua akan dijelaskan berbagai bentuk tulisan akademik seperti meringkas isi buku atau laporan (*summary*), menulis tinjauan kritis (*critical review*), ataupun bentuk lain seperti menulis esai atau laporan penelitian.

A. Jenis Struktur Penulisan

Esensi karya akademik adalah adanya argumen yang jelas. Penulis wajib menghadirkan argumen dalam tulisannya. Pertanyaannya adalah bagaimana

cara menghadirkan argumen? Argumen suatu karya akademik merupakan kesatuan dari ide-ide pokok yang tercantum dalam paragraf. Titik tekan menghadirkan argumen terletak pada susunan paragraf. Paragraf adalah elemen- elemen pembangun argumen dalam suatu karya akademik. Crème dan Lea (2008) menjelaskan beberapa jenis paragraf, yaitu: kronologi, deskripsi, sebab-akibat, perbandingan dan evaluasi. Masing-masing jenis dapat berdiri sendiri atau berkolaborasi untuk membangun suatu argumen, misalnya: argumen evaluasi dapat disusun dengan paragraf evaluasi semata atau menggabungkan antara paragraf kronologi, deskripsi, sebab-akibat, dan evaluasi.

1. Kronologi

Karakteristik utama paragraf kronologi adalah gagasan yang berbasis sekuen waktu (*time line*). Penyajian runtut berdasarkan alur waktu menjadi kekuatan jenis paragraf ini. Untuk menulis paragraf kronologis, penulis wajib memiliki kelengkapan data yang memungkinkan adanya susunan fakta secara kronologis. Tuntutan kelengkapan data ini menjadi titik kritis yang menyebabkan banyak penulis gagal

menulis secara kronologis. Kecenderungan yang terjadi adalah data tidak merata menurut sekuen waktu yang menjadi acuan penulisan.

Contoh paragraf kronologi:

Obama yang jiwa dan raganya melanglang buana. Ia lahir di Honolulu, dibesarkan di Jakarta, dan kembali ke Honolulu menghabiskan masa remaja sekaligus menamatkan pendidikan SLTA. Ia kuliah di *Colombia University, New York City* dan sempat bekerja di bursa saham di *Wall Street*. Tahun 1985 Obama menjadi *community organizer* di Chicago, lalu menamatkan pendidikan Pascasarjana di *Harvard Law School*, Boston tahun 1991. Setelah itu, Obama terjun ke politik dan terpilih menjadi Senator Negara Bagian Illinois dan berkantor di Chicago selama delapan tahun. Tahun 2005 terpilih sebagai Senator tingkat Federal mewakili Negara Bagian Illinois yang berkedudukan di Capital Hill, Washington DC (Shambazy, 2007: 7).

2. Deskripsi

Kata deskripsi berasal dari kata bahasa Latin *describere* yang berarti menggambarkan atau memberikan suatu hal. Dari segi istilah, deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencitrai (melihat, mendengar, mencium, dan merasakan) apa yang dilukiskan itu

sesuai dengan citra penulisnya. Karangan jenis ini bermaksud menyampaikan kesan-kesan tentang sesuatu, dengan sifat dan gerak-geriknya, atau sesuatu yang lain kepada pembaca, misalnya: suasana kampung yang begitu damai, tenteram, dan masyarakatnya yang saling menolong, atau suasana di jalan raya, tentang hiruk-pikuknya lalu lintas dapat dilukiskan dalam karangan deskripsi. Dalam istilah Geertz, hal ini disebut deskripsi mendalam (*thick description*). Keunggulan paragraf deskriptif adalah mampu menjelaskan konsep yang abstrak secara lebih konkrit sehingga mudah dipahami pembaca. Ada berbagai strategi yang lazim digunakan dalam jenis paragraf ini, misalnya: diagram, tabel, monografi, dan tipologi. Kualitas penulisan paragraf deskripsi tergantung pada kedalaman penjelasan. Banyak penulis terjebak dalam pola reportase, sehingga sulit membedakan antara liputan berita atau karya akademik.

Contoh Paragraf Deskripsi:

Lapisan ozon menipis. Hutan-hutan tropis mulai meranggas. Gurun makin luas. Akibatnya suhu bumi meningkat, cuaca tidak menentu, dan bencana alam makin sering datang. Kesimpulannya, bumi makin kritis. Siapa

sesungguhnya yang berperan dalam menjadikan planet bumi ini menjadi demikian ? Jawabnya tentu manusia sendiri.

3. Sebab-Akibat

Logika pikir yang mendasari penulisan paragraf sebab-akibat adalah hubungan satu isu atau fenomena dengan isu atau fenomena lain. Kata kuncinya adalah tidak ada isu atau fenomena yang berdiri sendiri. Ada tiga pertanyaan mendasar yang lazim di dalam paragraf sebab-akibat. *Pertama*, apa yang terjadi? Pertanyaan ini menuntut pemahaman penulis untuk menetapkan isu atau fenomena yang menjadi substansi penulisan. Sangat mungkin isu yang dipaparkan lebih dari satu. Namun demikian, variasi isu tidak dimaksudkan untuk membandingkan dan hanya memperkaya fenomena sejenis. *Kedua*, bagaimana hal tersebut terjadi? Pemaparan mengenai proses bekerjanya suatu isu atau fenomena sehingga memengaruhi munculnya fenomena lain. *Ketiga*, apa konsekuensi yang ditimbulkan? Akhir dari paragraf sebab-akibat menjelaskan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan atas suatu fenomena.

Contoh paragraf sebab-akibat:

Sistem jaminan sosial yang dibangun berdasarkan ikatan kultural di Sentani memiliki fungsi yang sangat strategis untuk meredam kerentanan masyarakat ketika badai krisis melanda seiring dengan perubahan sosial yang terjadi di Sentani. Percepatan perubahan sosial terjadi ketika Sentani ditetapkan sebagai wilayah zending agama Kristen Protestan pada awal abad ke-19. Hadirnya gereja mengubah sistem kepercayaan agama tradisional menuju agama Kristen Protestan. Keyakinan yang berporos pada *Ondofolo (naime bhekingge)* mulai bergeser menuju otoritas Yesus. Pergeseran ini mempengaruhi keseimbangan sistem jaminan sosial vertikal. *Ondofolo* dapat menjalankan fungsi *holeinarei* karena adanya pemberian masyarakat sebagai bentuk pencarian keselamatan. Praktik-praktik pemberian tersebut berhenti ketika pencarian keselamatan tidak lagi tertuju pada otoritas *Ondofolo*, melainkan pada Yesus. Oleh sebab itu, *ondofolo* mengalami krisis untuk menjalankan sistem jaminan sosial tradisional (Bahrudin, 2018:18).

4. Perbandingan

Paragraf perbandingan bertujuan untuk membandingkan dua hal atau lebih. Perbandingan dilakukan berbasis indikator-indikator tertentu. Oleh sebab itu, paparan indikator pembanding penting ada dalam paragraf perbandingan. Indikator-indikator inilah yang akan menunjukkan persamaan dan

perbedaan isu dan fenomena yang dibandingkan. Catatan kritis dalam jenis paragraf ini adalah ketidakjelasan indikator pembandingan. Banyak penulis tidak menggunakan indikator pembandingan yang konsisten ketika membandingkan dua hal atau lebih.

Contoh paragraf perbandingan:

Pembangunan menjadi agenda utama berbagai negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Tiap-tiap negara memiliki strategi yang spesifik dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Namun demikian, keunikan strategi pembangunan di tiap-tiap negara tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perbandingan kinerja pembangunan antar negara. Hal ini tidak lain karena sudah ada sejumlah indikator yang disepakati sebagai acuan evaluasi program pembangunan antar negara. Beberapa indikator tersebut adalah tingkat pendapatan, angka harapan hidup, dan lama sekolah. Komposit indikator-indikator tersebut disebut dengan indeks pembangunan manusia (*human development index*). Pada tahun 2009, angka harapan hidup di Indonesia adalah 70,5 tahun, sedangkan di Malaysia 74,1 tahun. Indikator pendidikan yang dilihat dari angka melek huruf menunjukkan bahwa Indonesia sebesar 90,0persen, sedangkan Malaysia sebesar 91,9 persen. Indikator pendapatan yang dilihat dari GDP menunjukkan bahwa Indonesia sebesar 3.712 dolar dan Malaysia sebesar 13.518 dolar. Dari perbandingan disimpulkan bahwa kinerja pembangunan di Malaysia lebih baik daripada Indonesia.

5. Evaluasi

Paragraf evaluasi bertujuan untuk memberikan penilaian (*judgement*) terhadap kebijakan atau program yang dievaluasi. Sangat mungkin beberapa penulis memberikan penilaian yang berbeda terhadap satu isu yang sama. Perbedaan ini terkait dengan penggunaan perspektif. Oleh sebab itu, paparan perspektif yang menjadi pijakan dalam evaluasi penting adanya dalam paragraf jenis ini. Hal ini penting agar pembaca mengetahui perspektif yang digunakan. Selain itu, penting juga untuk memaparkan indikator-indikator yang menjadi dasar evaluasi.

Contoh paragraf evaluasi:

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi kesepakatan global. Tiap-tiap pemerintahan menata diri untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Kualitas pelayanan publik menjadi salah satu hal penting dalam pengelolaan pemerintahan yang baik. Mekanisme dan prosedur yang transparan telah disusun untuk menjadi acuan bagi aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan. Di sisi masyarakat, transparansi mekanisme dan prosedur menjadi panduan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan haknya. Selain itu, mekanisme dan prosedur juga menjadi acuan untuk menilai

kualitas pelayanan yang diberikan. Masyarakat memiliki kesempatan untuk menilai kualitas pelayanan melalui survei kepuasan masyarakat melalui kotak pelayanan atau wawancara secara khusus. Survei kepuasan meliputi beberapa indikator seperti: prosedur, kejelasan tugas, kedisiplinan petugas, tanggung jawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan, keadilan, kesopanan dan keramahan, kewajaran biaya, kepastian biaya, dan kepastian jadwal. Berdasarkan perhitungan indikator tersebut, kualitas pelayanan publik di Sleman mendapat nilai 67,07. Artinya, kualitas pelayanan yang diberikan termasuk dalam kategori baik.

B. Bentuk Karya Ilmiah

1. Ringkasan (*Summary*)

Membaca ringkasan menjadi pilihan bagi para pembelajar untuk memahami karya akademik secara cepat. Ringkasan merupakan versi singkat dari sebuah teks (buku, artikel jurnal, laporan penelitian). Tujuan menulis ringkasan adalah menyajikan kepada pembaca sebuah gagasan paling penting dari sebuah teks dan memampatkan informasi dan argumen yang digunakan dalam mendukung gagasan utama sebuah tulisan (Friedman & Steinberg, 1989:140). Struktur penulisan dalam ringkasan lebih bersifat langsung

(*straight forward*). Ringkasan berisi tentang inti dari latar belakang, perspektif, argumen yang didukung bukti-bukti, metode (jika hasil penelitian), dan kesimpulan atau refleksi teoritis. Secara umum, panjang ringkasan antara 750-1.000 kata. Ringkasan ditulis dengan kalimat sendiri atau tidak menyalin kalimat dalam teks. Oleh sebab itu, kemampuan *paraphrase* mutlak dimiliki untuk menulis ringkasan. Ringkasan isi buku atau laporan penelitian akan sangat membantu para mahasiswa ketika mereka berada pada fase penulisan karya akademik seperti makalah, skripsi atau tesis.

Dengan membuat ringkasan setiap buku, artikel, laporan penelitian yang dibacanya, para mahasiswa cukup memanfaatkan ringkasan yang dibuat ketika menulis atau menggunakan buku sebagai referensi tulisan. Di samping itu, membuat ringkasan juga penting bagi mahasiswa yang akan menulis tinjauan kritis (*critical review*). Oleh karena itu, ringkasan biasanya tidak mengandung analisis, interpretasi, dan evaluasi (Friedman & Steinberg, 1989: 140). Membuat *summary* biasanya terdiri dari latar belakang masalah, konsep atau

teori, metode penelitian dan temuan serta kesimpulan.

Contoh ringkasan:

Penelitian ini menguak makna perebutan kekuasaan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dengan menggunakan *E-voting*. Selama ini Pilkades dilakukan secara manual dengan cara masyarakat mendatangi TPS dan mencoblos gambar calon. Setelah pencoblosan Pilkades selesai jam 13.00, kemudian masyarakat bisa menyaksikan proses penghitungan secara terbuka. Namun dengan kemajuan teknologi informasi, Pilkades manual mulai digantikan dengan aplikasi *E-voting*. Perubahan Pilkades manual menjadi aplikasi *E-voting* didasari asumsi bahwa metode lama dengan cara mencoblos dianggap tidak efektif dan efisien. Selain itu melalui metode mencoblos dianggap lama proses rekapitulasinya, melibatkan banyak orang dan rentan terhadap politik uang. Hal ini selaras dengan gerakan ramah lingkungan yang digaungkan Pemerintah, bahwa metode mencoblos calon menggunakan kertas suara dianggap tidak ramah lingkungan, karena pencetakan surat suara membutuhkan penebangan banyak pohon.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan menemukan makna dibalik kontestasi perebutan kekuasaan di ranah pedesaan. Dengan menggunakan teori *Foucault* tentang *governmentality* dan politik teknologi individu (*the political technology of individual*),

penelitian ini mencoba keluar dari penelitian tentang *E-voting* yang sudah dilakukan. Penelitian sejenis cenderung menggunakan pendekatan politik atau teknologi, sehingga terkesan kurang mendalam. Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah:

“Bagaimana bekerjanya politik teknologi menghasilkan kekuasaan dalam Pilkadaes E-voting?”

Upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut ditempuh dengan cara keluar dari pendekatan lama: kelembagaan, struktural, politik dan teknologi informasi. Sekalipun pendekatan politik dan struktural juga bisa mengkaji secara mendalam, namun penulis mencoba dengan hal yang baru dalam rangka menemukan *novelty* (*kebaruan*). Memang secara faktual penelitian ini juga didasarkan pada penelitian sebelumnya dan buku-buku terkait, namun peneliti mencoba keluar dari pola pikir yang biasa dengan cara mengkritisi fenomena Pilkadaes yang sudah berlangsung di Indonesia.

Pengumpulan data *primer*, dilakukan peneliti melalui wawancara mendalam, diskusi terfokus dengan beberapa narasumber terkait dan observasi lapangan. Selanjutnya peneliti mengolah data yang sudah terkumpul untuk mengecek validitasnya. Setelah data tervalidasi, data tersebut diklasifikasi untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Adapun pengumpulan data *sekunder* dilakukan peneliti melalui studi pustaka, pengumpulan jurnal-jurnal lima tahun terakhir dan buku-buku terkait dengan topik

penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman-DIY. Kalurahan Purwomartani menjadi pilihan sebagai lokasi penelitian, karena di Desa/Kalurahan ini bermukim secara bersama antara masyarakat dengan budaya tradisional dan masyarakat modern (pendatang). Dua kelompok masyarakat ini yang rentan terhadap praktik teknologi kekuasaan yang diinstrumentasi oleh elite politik.

2. Tinjauan Kritis (*Critical Review*)

Tinjauan kritis adalah sebuah tulisan yang lebih rumit daripada ringkasan karena mensyaratkan antara lain, kemampuan untuk menganalisis teks seperti yang dimaksudkan penulisnya, gagasan pengendali atau tesis, menganalisis teknik pengorganisasian, dan kemampuan meringkas (*summary*). Tujuan tinjauan kritis adalah memberikan penilaian kualitas sebuah tulisan. Ada dua pertanyaan mendasar untuk memberikan penilaian sebuah tulisan. *Pertama*, apakah informasi disajikan secara objektif? *Kedua*, apakah pendapat penulis *fair* dan logis (masuk akal)?

Struktur penulisan tinjauan kritis terdiri dari pengantar, ringkasan, kritik, dan kesimpulan. Isi pada

bagian pengantar sama dengan pengantar pada karya ilmiah lainnya. Ringkasan berisi perspektif, gagasan utama, dan kesimpulan penulis. Kritik berisi penilaian dari sisi pentingnya topik yang ditulis, keaktualan, panjang tulisan, tujuan penulis, interpretasi terhadap data, kelengkapan uraian, dan kepraktisan usulan penulisnya. Kesimpulan berisi tentang penilaian terhadap tulisan yang ditinjau, misalnya: apakah penulis sepakat dengan ide utama yang disampaikan atau mengambil posisi yang berseberangan. Rata-rata panjang telaah kritis antara 1.000-1.500 kata.

3. Esai

Esai adalah salah satu karya akademik yang paling sering dijumpai oleh mahasiswa. Dalam proses pembelajaran setiap semester, tidak sedikit dosen memberikan tugas membuat esai. Oleh sebab itu, kemampuan menulis esai mutlak dimiliki mahasiswa. Banyak definisi berkembang untuk menggambarkan esai. Namun demikian, terdapat satu kesepakatan bahwa esai terdiri dari tiga bagian, yaitu pengantar, batang tubuh atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pengantar terdiri dari gambaran umum dan

tesis yang akan dijawab melalui esai. Esai biasanya diawali dengan pernyataan secara eksplisit kalimat tesis atau gagasan pengendali.

Panjang pengantar dalam esai sekitar 10-20 persen dari keseluruhan esai. Bagian batang tubuh atau isi terdiri dari paragraf- paragraf yang memuat argumen utama. Pengorganisasian ide dalam paragraf dapat diwujudkan dalam berbagai jenis, seperti kronologi, deskripsi, sebab-akibat, perbandingan, dan evaluasi. Bukti-bukti atau contoh yang mendukung argumen, baik dari data primer maupun sumber-sumber lain menjadi bagian penting dalam batang tubuh. Bukti-bukti disampaikan secara objektif tanpa adanya tanggapan personal dari penulis. Secara umum, bagian isi sekitar 60-70 persen, dan bagian penutup atau kesimpulan sekitar 15-25 persen. Bagian penutup menyampaikan kembali gagasan penting yang dibangun dalam bagian isi. Secara umum, rata-rata panjang sebuah esai antara 2.500 - 3.000 kata.

4. Tugas Akhir

Setiap jenjang pendidikan mensyaratkan mahasiswanya untuk menulis sebuah karya ilmiah

yang menjadi tugas akhir. Karya ilmiah bagi mahasiswa pendidikan S1 adalah Skripsi, bagi mahasiswa S2 adalah Tesis, dan bagi mahasiswa S3 adalah Disertasi. Perbedaan ketiga bentuk karya ilmiah tersebut terletak pada kedalaman pembahasannya. Oleh sebab itu, jumlah kata untuk tiap-tiap tugas akhirpun berbeda-beda. Setiap institusi pendidikan memiliki aturan tersendiri mengenai jumlah kata untuk penulisan tugas akhir. Namun demikian, berdasarkan perbandingan (*benchmarking*) aturan akademik di berbagai universitas terkemuka di dunia, dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata jumlah kata tugas akhir adalah sebagai berikut:

a. Skripsi Sarjana : 15.000 - 25.000 kata

Skripsi adalah tulisan ilmiah yang digunakan untuk membedakannya dari tulisan non-ilmiah seperti: fiksi ataupun bentuk-bentuk penulisan esai dan opini. Perbedaan yang mendasar dari bentuk-bentuk yang terakhir adalah: tulisan ilmiah sangat terikat secara ketat dengan kaidah-kaidah dan norma-norma penulisan ilmiah. Kaidah-kaidah tersebut selain substansi tulisan yang mengupas suatu fenomena dengan memakai acuan teori yang

sudah diakui keberadaannya dalam khasanah ilmu pengetahuan, mencakup juga kaidah dalam teknik-teknik baku penulisan ilmiah, seperti: teknik mengutip, penulisan keputakaan, penulisan catatan kaki, bentuk outline tulisan, penulisan tabel, singkatan maupun pilihan diksi yang lebih ketat (sedapat mungkin memakai teknik denotatif bukan konotatif) dan lain-lain.

b. Tesis Magister : 30.000 - 40.000 kata

Tesis menurut pengertiannya adalah pengajuan suatu proposisi teoritis (tesa), dan lewat pembuatan tesis ini tesa (*academic standpoint*) sekaligus harus dibuktikan lewat penelitian ilmiah yang sudah harus lebih *advance*, tidak lagi sekedar deskripsi tapi layaknya berada pada taraf: *theory testing*.

c. Disertasi Doktoral : 80.000 - 100.000 kata.

Disertasi secara umum tidak terikat oleh jumlah kata, namun jumlah kata di atas merupakan standar umum yang berlaku di berbagai tempat. Suatu disertasi pada hakekatnya adalah pengembangan lebih lanjut dari suatu Tesis. Dengan kata lain pengajuan suatu proposisi teoritis dan teknik penulisan baku seperti Tesis adalah hal yang

mutlak. Namun yang membedakan dari Tesis adalah keluasan (ekstensif) dan kedalaman (*depth*) dari pembuktian tesisnya harus lebih *advance*. Idealnya suatu Disertasi harus lebih dari sekedar pengujian teori, lebih lanjut ia membuka kemungkinan pengajuan suatu terobosan teoritis yang baru. Jadi kalau bisa semacam “*theory building*”. Kalaupun belum memungkinkan dilakukan “*theory building*”, paling tidak ada sesuatu yang “baru” yang dihasilkan dari suatu karya Disertasi. Oleh karena itu metodologi penelitian yang digunakan harus lebih *advance*, karena perhatian utamanya lebih kepada membuat model teoritis baru.

Sebagai sebuah karya ilmiah, tinjauan kritis, esai, maupun tugas akhir perlu dilengkapi dengan abstrak. Abstrak merupakan *short cut* bagi pembaca untuk melihat isi suatu karya akademik. Ada beberapa hal penting yang lazim ada dalam abstrak, yaitu: perspektif, argumentasi utama, metode (jika hasil penelitian), dan kesimpulan. Rata-rata panjang abstrak antara 250-300 kata.

Contoh Abstrak:

Penelitian ini membahas tentang kontestasi kandidat perempuan dalam merebut kekuasaan tanpa politik uang. Tujuan penulisan artikel ini ialah menguak strategi pemenangan kandidat perempuan dengan tanpa politik uang dapat memenangkan kontestasi Pemilihan Kepala Desa/Kalurahan di Sriharjo, Bantul. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus kajian Pemilihan Kepala Desa/ Kalurahan Sriharjo, Bantul. Peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara, diskusi mendalam terhadap 25 (dua puluh lima) orang dan observasi. Adapun data sekunder, peneliti kumpulkan melalui studi pustaka, dokumentasi, foto, video dan internet. Analisis data berproses dari induksi, interpretasi dan konseptualisasi dengan paradigma fenomenologi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan adanya momentum yang tepat, kepercayaan diri, dukungan keluarga, pendekatan hati nurani, sosialisasi intensif kepada masyarakat, maka kandidat mampu memenangkan kontestasi Pemilihan Kepala Desa/ Kalurahan Sriharjo, Bantul.

Kata-kata kunci: perempuan, kepercayaan diri, sosialisasi intensif dan hati nurani.

BAB III

PENGORGANISASIAN KARYA ILMIAH

A. MENYUSUN PROPOSAL PENELITIAN

Proposal penelitian berarti sebuah usulan untuk melakukan penelitian ilmiah. Kekeliruan yang sering dibuat oleh mahasiswa, peneliti, maupun penulis pada umumnya adalah menganggap bahwa proposal secara otomatis akan dikonversi menjadi Bab I pada laporan akhir hasil penelitiannya. Padahal sesuatu yang bersifat usulan bisa jadi berubah total manakala temuan lapangan tidak mengonfirmasi usulan yang dimuat dalam proposal awal. Dengan demikian sangat penting untuk memahami bahwa proposal penelitian adalah sesuatu yang bersifat tentatif dan dinamis. Proposal penelitian adalah sebuah tulisan yang berisi uraian tentang topik penelitian, masalah pokok penelitian, dan ide pokok, serta kerangka pikir yang digunakan oleh peneliti untuk memahami sebuah masalah politik dan pemerintahan.

Sebuah proposal penelitian yang baik sekurang-kurangnya memuat beberapa aspek di bawah ini:

1. Topik Penelitian

Topik penelitian yang dimaksudkan di sini bukan judul penelitian. Pemilihan topik penelitian harus menyesuaikan dengan *standing position* Ilmu Pemerintahan yang dikembangkan di STPM “APMD” yang mengusung konsep 5G, yaitu: *Government, Governance, Governing, Governability* dan *Governmentality*. Kelima konsep tersebut bisa diperlakukan sebagai objek kajian maupun sebagai perspektif. Topik penelitian tidak harus disebutkan secara eksplisit dalam judul penelitian. Akan tetapi peneliti perlu memberikan kejelasan tersebut di dalam *framework* yang digunakan, dan juga pada pertanyaan penelitian, baik secara tersurat maupun tersirat.

a. Pemahaman Tentang Topik Penelitian

Setiap kajian ilmiah pasti mendasarkan pada topik tertentu. Topik penelitian sendiri dapat didefinisikan sebagai serangkaian rumusan pertanyaan yang menjadi inti penelitian.

Artinya, topik merupakan hal pokok yang akan diteliti atau pokok perbincangan dalam penulisan artikel ilmiah. Topik penelitian berada sebelum seseorang melakukan penelitian. Oleh karena itu, setiap peneliti harus menyiapkan topik penelitian sebagai landasan dasar yang kokoh, sebelum memulai langkah penelitian. Sebagai landasan mendasar, topik penelitian akan memandu setiap tahapan penelitian. Dapat ditarik kesimpulan, topik penelitian adalah landasan utama yang harus ada dalam penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk terlebih dahulu memikirkan topik dalam penelitian.

b. Kriteria Topik Penelitian yang Baik.

Hal utama dan pertama yang menentukan keberhasilan penelitian adalah rumusan topik penelitian yang baik. Topik penelitian yang baik mengandung kualitas dengan karakteristik *clear*/jelas, dengan bahasa sederhana namun lugas, serta memberi manfaat. Pendek kata, kriteria tersebut terangkum dalam topik penelitian yang solid. Berikut ini adalah karakteristik topik penelitian yang solid :

- **Kejelasan/*Clarity***

Topik penelitian haruslah dinyatakan dengan jelas sehingga orang lain dapat dengan mudah mengerti apa yang diteliti. Topik penelitian jangan sampai memunculkan tafsir yang beragam (multi interpretasi) tentang obyek penelitian yang tengah dalam kajian. Sebisa mungkin mahasiswa merumuskan topik dengan interpretasi tunggal sehingga tidak membuka tafsir lain yang dapat mengganggu pemahaman terhadap topik yang diteliti. Ringkasnya, topik penelitian harus bebas dari ambiguitas pemahaman. Kejelasan berarti pula topik penelitian harus dapat memandu penggunaan jenis metodologi penelitian yang dipakai. Bagaimanapun juga kejelasan topik menjadi kualitas terpenting topik penelitian apapun.

- **Bahasa Sederhana**

Rumusan topik penelitian harus menggunakan bahasa sederhana namun lugas agar mudah dimengerti. Hindari penggunaan istilah teknis-ilmiah yang hanya dapat dipahami komunitas epistemik tertentu. Istilah teknis-ilmiah digunakan hanya jika tidak terdapat padanan

istilah umum yang memadai. Penggunaan istilah teknis-ilmiah juga disertai dengan penjelasan yang memadai agar tidak kehilangan makna kontekstualnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari bias pemahaman tentang topik penelitian.

- **Memberi Manfaat**

Topik yang solid juga memberikan gambaran tentang manfaat yang dapat dipetik dari topik tersebut. Setidaknya terdapat dua jenis manfaat dalam topik yang akan dikaji yakni: *pertama*, manfaat akademis berupa kontribusi ilmiah yang jelas bagi pengembangan bidang studi/disiplin ilmu yang tengah diteliti. *Kedua*, manfaat praktis berupa kontribusi *amaliah* dalam upaya memberikan solusi nyata atas masalah-masalah publik. Topik yang usang tentu tidak akan banyak memberi sumbangan berarti. Oleh karena itu, mahasiswa juga harus menakar seberapa banyak topik tersebut memberi manfaat akademis dan praktis.

2. Abstraksi Awal

Abstraksi awal yang dimaksud bukanlah ringkasan atau kesimpulan awal tentang fenomena pemerintahan yang akan diteliti. Abstraksi yang dimaksud berisi tentang gambaran umum peneliti mengenai masalah yang akan diteliti. Pada bagian awal proposal, peneliti sudah harus memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang akan diteliti, bagaimana cara menelitinya, dan mengapa masalah itu harus diteliti. Gambaran ini penting untuk melihat tingkat keresahan peneliti tentang masalah yang akan diteliti. Semakin spesifik masalah yang akan diteliti, maka semakin mempermudah peneliti dalam melakukan langkah-langkah riset selanjutnya.

Abstraksi awal ini tidak harus ditulis secara terpisah menjadi sub-bab tersendiri dalam proposal penelitian. Biasanya abstraksi awal ini diletakkan pada paragraf awal dalam sub-bab tentang latar belakang masalah penelitian. Jadi dalam latar belakang masalah penelitian, peneliti sudah harus memberikan gambaran tentang studi tersebut hendak mengkaji apa, bagaimana cara mengkajinya, dan untuk apa masalah tersebut perlu dikaji. Dengan

demikian pembaca sudah mendapatkan informasi dasar sejak awal tentang arah penelitian yang akan dilakukan.

3. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah berisi uraian tentang apa yang sedang terjadi (*das sein*) dan apa yang seharusnya terjadi (*das solen*) pada sebuah fenomena politik dan pemerintahan yang akan diteliti. Sebagai contoh, jika seorang peneliti ingin mengetahui mengapa ada konflik tanah kas desa di sebuah desa, maka latar belakang masalah harus berisi gambaran ideal tentang bagaimana seharusnya tanah kas desa tersebut dikelola. Pada sisi lain menggambarkan kenyataan yang terjadi bahwasanya tanah kas desa ternyata mengalami masalah dalam hal sistem yang dilakukan dalam pengelolaan. Gap antara *das sein* dan *das solen* itulah yang menjadikan masalah itu menjadi *urgen* untuk diteliti.

Langkah berikutnya dalam bagian latarbelakang masalah adalah peneliti perlu memberikan hipotesis awal tentang mengapa problem/masalah itu terjadi. Pada fase ini, peneliti sudah harus memiliki data awal

sebelum melakukan studi lapangan (*field study*). Sebagai contoh, jika peneliti ingin menjelaskan tentang masalah tanah kas desa, maka peneliti sudah harus menghimpun informasi awal mengenai mengapa tanah kas desa tersebut menjadi persoalan. Itulah yang menjadi argumentasi awal atau hipotesis peneliti sebelum melakukan penelitian lapangan. Pada dasarnya aktivitas riset itu tidak dimulai saat pergi ke lokasi penelitian, aktivitas riset itu sudah dimulai saat peneliti menulis proposal penelitian.

Hal yang tidak kalah penting adalah bagian latar belakang masalah sudah harus memberikan gambaran tentang cakupan dan fokus masalah yang akan diteliti. Cakupan atau ruang lingkup penelitian bisa berbasis pada teori, data, dan metode penelitian. Dengan kata lain, peneliti tidak perlu memaksakan diri untuk meneliti segala masalah pemerintahan yang sedang terjadi. Apabila seorang mahasiswa Ilmu Pemerintahan ingin meneliti masalah tanah kas desa, maka otomatis teorisasinya berbasis pada teori politik dan pemerintahan. Peneliti harus memiliki bayangan sejak awal tentang teori apa yang akan digunakan sebagai pintu masuk untuk melakukan riset. Selain batasan teoritik, peneliti juga harus

mempertimbangkan aksesibilitas data. Ketersediaan data juga bisa menjadi pembatas sejauh mana masalah penelitian tersebut bisa diteliti. Cakupan penelitian juga bisa dibatasi oleh metode penelitian. Ada jenis masalah politik dan pemerintahan yang hanya cocok atau efektif bila diteliti dengan pendekatan tertentu, misalnya *etnografi*, *survey*, atau deskriptif.

4. Rumusan Masalah

Masalah adalah basis pengetahuan, oleh karena itu merumuskan masalah yang baik harus memasukkan konsep. Ilmu pengetahuan berkembang karena dimulai dari rumusan masalah yang konkrit dan memiliki unsur kebaruan (*novelty*). Perlu dicatat bahwa masalah penelitian berbeda dengan masalah sosial. Seringkali mahasiswa, peneliti, atau penulis pada umumnya mengalami kesulitan pada fase merumuskan masalah, karena seringkali menggabungkan antara masalah sosial dengan masalah penelitian. Pertanyaan penelitian (*research question*) harus menjadi “bintang penuntun” bagi peneliti sejak fase pertama sampai proses akhir penelitian. Pertanyaan penelitian biasanya dimulai

dengan kalimat tanya: *apa, mengapa, bagaimana*, dan seterusnya. Pertanyaan penelitian bisa lebih dari satu untuk satu aktivitas penelitian.

5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian dapat digabungkan menjadi satu kesatuan sub-bab, atau dapat dipisah yaitu masing-masing menjadi sub-bab tersendiri sesuai kebutuhan. Pada dasarnya tujuan penelitian dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum berfungsi untuk memahami secara garis besar hakekat objek penelitian. Sementara tujuan khusus berfungsi untuk menjabarkan secara rinci masalah pokok penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah kemudian diturunkan menjadi rumusan masalah dan dari rumusan masalah ini dijabarkan menjadi tujuan khusus dari penelitian.

Sedangkan manfaat penelitian harus sesuai dengan tujuan penelitian. Secara konseptual manfaat dapat dipilah menjadi 2 (dua) bagian yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Secara teori, penelitian bisa bermanfaat untuk menemukan teori

baru, sekaligus me-*review* teori lama. Secara praktis, penelitian bisa bermanfaat untuk perbaikan kebijakan, advokasi persoalan dan *stakeholder* yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

6. Tinjauan Pustaka (*Literature Review*)

Tinjauan Pustaka (*literature review*) pada prinsipnya adalah aktivitas melakukan tinjauan terhadap berbagai literatur, karya, atau hasil penelitian terdahulu yang mengkaji topik yang sama atau mendekati topik yang akan diteliti. *Literature review* bukan suatu kumpulan definisi oleh para pakar. *Literature review* juga bukanlah ringkasan (*resume*) terhadap hasil penelitian terdahulu. *Literature review* berisi tentang kajian antar karya penelitian terdahulu. Proses kajian berbagai karya penelitian terdahulu inilah yang akan menentukan *standing position* seorang peneliti dalam memulai studinya.

Peneliti yang membuat *literature review* harus dituntun dengan pertanyaan: *siapa, berbicara apa, perspektifnya apa, argumentasi utamanya apa, dan batasan kajiannya apa*. Batasan yang dimaksud di sini adalah menemukan limitasi dari kajian-kajian

terdahulu, yakni apa yang sudah dibicarakan, dan apa yang belum sempat dibahas para peneliti terdahulu. Membuat *literature review* juga bermanfaat untuk mengetahui kekuatan sekaligus kelemahan dari hasil-hasil kajian terdahulu. Hasil kajian yang sudah di-*review* lalu dibandingkan dengan karya lain yang sejenis. Proses ini harus terus berlangsung secara simultan, sampai pada titik di mana peneliti “menemukan kekosongan” atau perspektif yang belum mendapatkan perhatian dari para peneliti terdahulu. Kapasitas peneliti dalam menemukan “ruang kosong” inilah yang akan menjadi penentu aspek *novelty* daripada hasil penelitian.

Pada dasarnya tidak ada batasan berapa jumlah literatur yang harus di-*review* untuk memulai suatu aktivitas penelitian. Namun semakin banyak literatur yang di-*review*, maka semakin bermanfaat. Tidak ada rumusan yang baku mengenai format *literature review*, namun prinsip mendasar dari proses *literature review* adalah menemukan *gap* (kesenjangan) antara kajian-kajian terdahulu dan menemukan “ruang kosong” yang akan diisi dengan penelitian yang baru akan dilakukan.

7. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah *logical frame work* yang digunakan oleh peneliti untuk memahami fenomena yang akan diteliti. Suatu fenomena sosial dengan sumber data yang sama dapat menghasilkan temuan yang berbeda apabila dipahami dengan menggunakan teori yang berbeda pula. Kerangka teori yang ditulis dalam proposal penelitian bukan semata-mata kumpulan pendapat para ahli mengenai masalah yang akan diteliti. Pada bagian ini teori harus dikemukakan dalam konteks penggunaannya secara praktis dalam penelitian.

Pada prinsipnya kerangka teori adalah teori yang dianggap paling relevan untuk menjelaskan objek penelitian. Kuncinya terletak pada relevansi antara teori dengan objek penelitian. Idealnya objek penelitian yang menentukan teori apa yang paling relevan untuk digunakan, bukan sebaliknya. Pada naskah proposal, teori masih merupakan sesuatu yang tentatif, karena peneliti masih memiliki jarak dengan objek penelitian, sehingga teori yang digunakan bisa saja berubah pasca melakukan studi lapangan. Sebagai contoh, apabila peneliti ingin melakukan

penelitian tentang fungsi representasi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka teori yang paling relevan misalnya teori representasi Hanna Pitkin tentang representasi simbolik, representasi deskriptif, dan representasi substantif. Akan tetapi apabila nanti temuan lapangan menunjukkan bahwa teori representasi Hanna Pitkin tidak cukup relevan untuk menjelaskan fungsi representasi BPD di suatu desa, maka bisa saja digunakan teori lain yang lebih relevan.

Dilema yang seringkali dihadapi oleh peneliti adalah ketika menemukan data yang tidak atau kurang cocok dengan teori yang ia gunakan, sementara data tersebut cocok dengan teori lain yang tidak terlalu dikuasai oleh peneliti. Di sini peneliti dihadapkan pada pilihan, apakah teori yang melayani data, atau data yang melayani teori. Pilihan-pilihan ini sangat ditentukan oleh tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan. Untuk level mahasiswa khususnya S1, fleksibilitas teori masih menjadi hal yang normal, karena skripsi adalah karya yang bersifat *explanatory*, atau menjelaskan cara kerja teori.

Akan tetapi untuk penelitian-penelitian yang diminta oleh pihak lain semisal lembaga pemerintah,

swasta, atau donor internasional, maka penggunaan teori akan sangat disesuaikan dengan kebutuhan dari pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.

8. Metode Penelitian

Metode berbeda dengan metodologi. Metode berasal dari bahasa latin *methodos* yang merupakan gabungan dari kata *meta* dan *hodos*. *Meta* berarti melalui, menuju, atau mengikuti, sedangkan *hodos* berarti jalan, rute, atau arah. Metode dapat diartikan sebagai cara-cara, strategi untuk memahami realitas, serta langkah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab-akibat berikutnya.

Sementara itu, metodologi dapat dipahami sebagai ilmu mengenai metode, atau pengetahuan tentang cara, strategi dan pendekatan. Metodologi dapat dimaknai sebagai keseluruhan proses sejak awal hingga akhir tahapan penelitian. Dengan demikian, metodologi adalah pemahaman mengenai metode, bukan metode itu sendiri. Di dalam metodologi terdapat konsep, proposisi, hipotesis, teori, dan metode itu sendiri. Metode sekurang-kurangnya mencakup tiga aspek yakni; metode pengumpulan

data, metode analisis data, dan metode penyajian analisis data.

a. Metode Pengumpulan Data

Secara umum, metode pengumpulan data dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu metode lapangan (*field study*) dan metode pustaka (*desk study*). Setiap metode pengumpulan data tersebut akan dilakukan dengan teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data yang bervariasi. Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh peneliti berupa observasi, dokumentasi, wawancara, *focus group discussion*, *shadowing* dan lain-lain. Instrumen pengumpulan data dapat berupa pedoman wawancara, kuesioner (angket), *field report* (laporan lapangan), dan lain sebagainya.

b. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang secara umum dikenal adalah metode kualitatif, kuantitatif, induktif, deduktif, hermeneutik, deskriptif analitik dan lain sebagainya. Dalam ilmu-ilmu sosial humaniora, menurut Bogdan dan Biklen (1992:3), pada derajat tertentu metode kualitatif memiliki persamaan dengan interpretasi (*verstehen*), analisis isi, alamiah, naturalistik, studi

kasus, etnografi, dan fenomenologi. Meskipun demikian, istilah yang paling umum digunakan adalah kualitatif.

c. Metode Penyajian Data

Data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis akan disajikan dengan menggunakan metode tertentu. Pada umumnya metode penyajian data bisa dilakukan secara formal melalui diagram, tabel, grafik, statistik, atau rumus-rumus tertentu dan disajikan secara informal melalui deskripsi, narasi, dan *eksplanatory*. Untuk metode formal yang disebut pertama biasanya digunakan dalam pendekatan kuantitatif, sedangkan untuk yang bersifat naratif biasanya digunakan dalam studi-studi kualitatif dan juga kuantitatif.

B. RANCANGAN PENELITIAN (*Research*)

Research berasal dari kata *re* dan *search*. *Re* berarti „kembali“ dan *search* yang berarti „mencari“. Jadi *research* adalah proses pencarian kembali secara terus menerus dalam rangka menemukan pengetahuan baru. Prinsip ini perlu dipahami oleh semua mahasiswa, dosen, peneliti, atau penulis pada umumnya. Penelitian merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan demikian pelaksanaannya merupakan bagian dari tanggungjawab moral dan akademik dari seluruh civitas akademika kampus. Secara umum, tahapan-tahapan penelitian dimulai dari proses mengambil data, mengorganisir data, memverifikasi data, dan menganalisis data.

Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan penelitian , sebagai berikut:

1. Pedoman Penelitian Lapangan

Pedoman penelitian yang dimaksudkan adalah instrumen yang perlu dipersiapkan untuk merekam data lapangan. Instrumen ini sangat terkait dengan

metode penelitian yang digunakan serta teknik pengumpulan data. Secara umum, instrumen penelitian yang sering digunakan adalah pedoman wawancara, kuisioner, laporan lapangan (*field report*), dan lain-lain.

2. Pengumpulan Data (Pilah Data)

Mengumpulkan data adalah aktivitas mencari dan merekam data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sebenarnya aktivitas pengumpulan data bukan baru dimulai saat peneliti pergi ke lokasi penelitian, akan tetapi pengumpulan data sudah bisa dimulai sejak peneliti menulis proposal, atau bahkan sejak peneliti mulai memikirkan isu dan masalah penelitian. Peneliti bisa mengumpulkan data dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder, yang bersifat *offline* maupun *online*. Pada tahapan ini peneliti perlu memastikan bahwa data yang sudah dikumpulkan dapat diuji kebenarannya dan ketepatan informasi dengan teknik triangulasi data.

3. Pengorganisasian Data Primer

Data primer didapat peneliti melalui wawancara, diskusi mendalam dan observasi lapangan. Adapun data sekunder dikumpulkan peneliti melalui jurnal-jurnal, buku-buku, dokumen, dan lain-lain. Selanjutnya peneliti mengorganisasi data, memilah data dan mengelompokkan data sesuai dengan kebutuhan (menjawab rumusan masalah). Tahapan ini bisa juga disebut dengan kompilasi data atau membuat kluster data. Peneliti harus membuat *mapping* data mana yang relevan dengan pertanyaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan tujuan penelitian.

4. Verifikasi Data

Tahapan ini adalah tahap *cross-check* atau verifikasi data. Tahapan ini tidak hanya soal aspek keabsahan sumber data, tetapi juga soal kebaruan data, terutama data yang bersifat dinamis dan fluktuatif, misalnya: jumlah penduduk, angka kemiskinan, jumlah dana desa, dan lain sebagainya. Jika peneliti mengumpulkan data soal jumlah rumah tangga miskin

di suatu desa, maka peneliti perlu memastikan institusi yang mengeluarkan data tersebut bisa dipertanggungjawabkan, dan menggambarkan kondisi terbaru di desa tersebut.

5. Analisis Data

Tahapan ini merupakan tahap krusial dalam melakukan penelitian. Data yang sudah dikumpulkan, dikompilasi berdasarkan hasil triangulasi data. Selanjutnya dianalisis dengan teori yang menjadi *logical frame work* dan kerangka pikir penelitian (perspektif penelitian). Analisis adalah proses mendialogkan atau membangun diskursus mengenai teori dan data temuan lapangan, sehingga menghasilkan abstraksi dan narasi yang akan menjadi temuan penelitian, misalnya dengan menggunakan teori representasi Hanna Pitkin (1967), peneliti ingin menganalisis fungsi representasi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di suatu desa. Oleh karena itu peneliti akan menganalisis, berdasarkan data yang ada, fungsi representasi yang dilakukan oleh BPD termasuk dalam kategori representasi deskriptif, substantif, simbolik, atau mungkin bukan salah satu dari ketiga kategori yang

dibuat oleh Hanna Pitkin tersebut.

6. Temuan Penelitian

Temuan penelitian bisa dimaknai dalam 2 (dua) perspektif, yakni: *pertama*, temuan berupa data. *Kedua*, temuan berupa narasi data yang sudah didialogkan dengan teori. Temuan data berupa data deskriptif, sementara temuan penelitian yang bersifat deskriptif di atas selanjutnya didialogkan dengan teori menjadi argumentasi tulisan, misalnya: temuan data yang ada menunjukkan bahwa fungsi representasi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersifat deskriptif, maka hal ini menghasilkan argumentasi bahwa model representasi yang dilakukan oleh Pitkin juga bisa diterapkan atau berlaku di level desa. Namun, bila temuan lapangan menunjukkan bahwa model representasi yang ada di desa tidak termasuk salah satu dari ketiga jenis representasi ala Pitkin (1967), maka temuan tersebut akan menghasilkan argumentasi baru tentang limitasi dari bekerjanya teori representasi yang digagas oleh Hanna Pitkin (1967).

7. Kebaruan Tulisan (*Novelty*)

Aspek kebaruan (*novelty*) bisa berupa kebaruan data, kebaruan argumentasi, maupun kebaruan teori. Aspek kebaruan inilah yang akan menjadi nilai lebih dari karya yang akan dihasilkan oleh peneliti. Aspek kebaruan sangat terkait erat dengan proses *literature review* yang sudah dilakukan pada tahapan sebelumnya. Kebaruan data belum tentu menghasilkan kebaruan argumentasi. Sebaliknya kebaruan argumentasi belum tentu dihasilkan dari kebaruan data. Dalam kasus fungsi representasi yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, bisa jadi temuan di desa yang berbeda, akan menghasilkan argumentasi yang sama, yaitu cara kerja teori representasi ala Pitkin (1967) yang memiliki limitasi tertentu, jika dioperasikan pada lingkup politik yang sangat kecil di desa.

8. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan adalah esensi dan jawaban atas pertanyaan penelitian yang berupa pernyataan, atau proposisi-proposisi, narasi, abstraksi, sekaligus

argumentasi penulis atas keseluruhan karya tulis ilmiah yang dihasilkan dari proses penelitian. Kesimpulan harus disusun dengan bahasa yang efektif dan efisien, dan pada umumnya berupa narasi saja, tanpa disertai dengan misalnya diagram, tabel dan lain sebagainya.

Adapun saran adalah tindak lanjut dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Saran adalah anjuran kepada siapa, untuk melakukan apa, dan seterusnya. Dalam kerja akademik seperti penelitian, saran dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: saran yang bersifat akademis, dan bersifat praktis. Saran akademis berupa anjuran kepada peneliti lain untuk meneliti aspek-aspek yang belum diteliti sebelumnya. Sementara saran yang bersifat praktis adalah saran yang dapat langsung dilakukan oleh *stakeholder* yang berkaitan dengan topik penelitian, misalnya: masyarakat, swasta, maupun pemerintah sebagai pengambil kebijakan.

C. ARGUMENTASI KARYA ILMIAH

Salah satu ciri penting tulisan akademik yang baik adalah adanya argumen yang jelas. Argumen

yang dibangun oleh seorang penulis akan menunjukkan kualitas tulisan akademiknya. Dari argumen, bisa diketahui kejelasan gagasan, susunan logika, dan konsistensi datanya. Orang sering menyebut tulisan yang memiliki argumen yang baik adalah tulisan yang tampak jelas "benang merah" pemikirannya. Menulis argumen dengan baik bukanlah pekerjaan yang mudah. Kita sering menemukan tulisan yang membingungkan pembacanya. Ketidak-jelasan tersebut dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu : *Pertama*, ketidak-jelasan pada gagasan utamanya. Seringkali, seseorang ingin mengangkat semua isu dalam sebuah tulisan sehingga justru tidak muncul gagasan utama yang ingin disampaikan, misalnya: sebuah tulisan memuat beberapa pertanyaan sekaligus yang menyangkut tentang apa penyebab konflik di masyarakat, bagaimana dampak konflik terhadap kehidupan sosial masyarakat dan seberapa jauh efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani konflik.

Kedua, logika pengungkapan gagasan yang tidak *straight forward* (langsung) pada pertanyaan yang

ingin dijawab. Secara kultural, cara berpikir dan bicara masyarakat kita yang berputar-putar sangat mempengaruhi cara pengungkapan argumen secara tertulis. Tidak jarang kita baru memahami apa yang diinginkan seorang penulis setelah membaca di halaman yang ke sepuluh atau bahkan di akhir tulisan. Seringkali bahasa dan kalimat yang banyak basa-basi membuat kebingungan para pembaca untuk memahaminya. Tipe ini banyak ditemukan para penulis dan peneliti, karena dianggap lebih komprehensif jika banyak menguraikan fenomena dan teori di awal, padahal seringkali itu yang membuat kebingungan bagi pembaca.

Ketiga, ketidakjelasan antara gagasan yang ingin disampaikan dengan argumen batang tubuh tulisan. Dalam kasus ini, penulisnya mampu mengungkapkan tujuan tulisannya dengan jelas, tetapi tidak diikuti dengan penjelasan yang konsisten, baik data maupun analisisnya. Misalnya: seorang penulis ingin menjawab "Seberapa jauh pendidikan anti korupsi efektif untuk mengurangi tingkat korupsi?", tetapi batang tubuhnya justru menjelaskan dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi, selain itu data yang

digunakan tidak relevan dengan pertanyaan yang diajukan di awal tulisan.

Dari tiga kasus di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tulisan yang baik berciri seperti berikut ini :

- A. Tulisan memiliki satu pertanyaan utama.
- B. Tulisan sejak awal mengungkapkan gagasan yang ingin disampaikan.
- C. Tulisan didukung dengan penjelasan yang logis dan data yang relevan.

Dalam sebuah panduan penulisan, Universitas Dartmouth menunjukkan beberapa kriteria argumen yang baik, yaitu sebagai berikut.

- a. Adanya tesis yang mengungkapkan posisi penulis tentang suatu masalah.
- b. Adanya pengakuan terhadap pandangan lain yang sejalan dan bertentangan dengan argumen yang diungkapkan.
- c. Adanya seperangkat premis yang didefinisikan secara jelas yang menggambarkan argumen.
- d. Adanya bukti yang mampu memberikan jawaban terhadap premis tersebut.
- e. Adanya kesimpulan yang meyakinkan pembaca bahwa argumen tersebut masuk akal dan jelas.

Sebuah tulisan dengan argumen yang baik akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Tulisan tersebut biasanya menunjukkan hal yang sudah menjadi perdebatan pada isu tertentu, bagaimana pro-kontra pandangan-pandangan yang sudah berkembang dan pandangan yang ditawarkan oleh penulis agar melengkapi yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian, hasil penulisan tersebut tidak menciptakan pengulangan terhadap temuan-temuan sebelumnya. Ada beberapa tingkat kedalaman sebuah tulisan sehingga dianggap memiliki argumen yang baik.

Beberapa tingkatan dalam membuat argumen antara lain:

1. Tingkat yang paling rendah adalah menunjukkan jawaban atas kesenjangan antara kondisi ideal (*das sollen*) dan kenyataan yang terjadi (*das sein*), misalnya: seseorang berusaha membuat tulisan untuk menjawab pertanyaan "Mengapa kinerja program pengurangan pengangguran atau menciptakan lapangan pekerjaan sangat buruk?" Dalam kasus ini, seseorang menulis dengan dasar bahwa ada fenomena, buruknya pelaksanaan sebuah program pengurangan pengangguran atau menciptakan lapangan pekerjaan. Contoh lain dalam kaitannya membuat argumen atas dasar

kondisi yang ideal dan kenyataan yang terjadi yaitu memiliki pertanyaan tentang “kondisi pemilihan umum yang ideal adalah yang memiliki unsur *luber jurdil* (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil). Namun dalam kenyataannya banyak sekali terjadi praktik *money politics* seperti pembelian suara dan lain-lain”.

2. Pada tingkatan yang lebih tinggi adalah seseorang menunjukkan adanya kesenjangan dalam perdebatan akademik yang tidak menyinggung isu tertentu, misalnya: dalam perdebatan Otonomi Daerah, banyak peneliti hanya memberikan perhatian pada isu hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Seseorang yang kritis akan mempertanyakan bahwa ada isu penting lain yang perlu dibahas, yaitu bahwa Otonomi perlu mempertanyakan relasi antara Pemerintah dan Masyarakat.
3. Tingkatan yang paling tinggi adalah seseorang mempertanyakan keabsahan atau kesahihan dari sebuah pendapat atau argumen yang sudah mapan, misalnya: ada tesis atau argumen yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan

melahirkan pertumbuhan demokrasi yang tinggi pula. Seorang peneliti akan mengkritisi pendapat tersebut dan berusaha membangun argumen baru dan memberikan data yang lengkap untuk menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat pertumbuhan demokrasi. Selanjutnya, peneliti tersebut bisa melahirkan argumen bahwa pertumbuhan demokrasi lebih dipengaruhi oleh adanya modal sosial yang tinggi.

Oleh karena itu, untuk menghasilkan argumen yang baik dengan tingkatan yang tinggi, seorang penulis tidak cukup hanya melihat fakta-fakta empiris. *Das sollen* (yang seharusnya) dan *das sein* (kenyataan) yang ditemukan dalam praktik tidak cukup menjadi argumen bahwa isu tersebut perlu diangkat menjadi tulisan. Kesenjangan teoretis menjadi syarat penting untuk meyakinkan bahwa tulisan tersebut akan memberikan kontribusi pemikiran.

Kesenjangan empiris tidak cukup sebagai dasar karena apa yang menjadi kesenjangan empiris bisa jadi jawaban teoretisnya sudah jelas, misalnya: dalam

dunia kedokteran, fakta empiris bahwa orang sakit kepala tidak menarik dan tidak penting untuk diteliti karena jawaban teoretisnya sudah jelas, yakni harus minum obat tertentu. Isu itu menarik untuk diteliti apabila sakit kepala bukan yang biasa terjadi dan belum ditemukan jawaban teoretis berdasar temuan-temuan sebelumnya.

Dalam ilmu sosial, ada beberapa contoh yang menarik untuk melihat bagaimana argumen dibangun. Misalnya, hasil penelitian Clifford Geertz (1992) yang menyimpulkan bahwa masyarakat Jawa terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: santri, abangan, dan priyayi. Kita bisa menulis artikel tentang hal yang sama dengan cara melawan pendapat Geertz tersebut dan menunjukkan bahwa kategorinya tumpang tindih. Priayi dalam kategori Geertz bukanlah kategori yang bisa menunjukkan tingkat religiositas seseorang, melainkan kategori sosial yang membedakannya dengan kalangan bawah. Kategori abangan misalnya bukan dilihat dari orang yang tidak beragama atau hanya suka terhadap klenik, namun juga berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat abangan.

Dengan sudut pandang yang lain, seorang penulis bisa menemukan argumen lain bahwa

masyarakat Jawa bukan seperti yang digambarkan Geertz, misalnya: temuan Nakamura menunjukkan bahwa kategori statis santri dan abangan tidak muncul di masyarakat Yogyakarta. Pada kenyataannya, ada proses dinamis Islamisasi dari masyarakat yang semula abangan menjadi santri sebagaimana ditunjukkan dengan adanya berbagai pengajian.

Kesenjangan teoritis yang menjadi tingkatan tertinggi dalam membuat argumen merupakan salah satu upaya atau cara bagi para penulis untuk lebih banyak membaca dan memperdalam *literature review*.

Selanjutnya perdebatan teoritis terkait kekalahan petahana dalam kontestasi Pilkada. Penelitian yang dilakukan oleh Monicha Anggraini terkait kekalahan petahana di Kabupaten Lampung Utara sangat berkaitan dengan kinerja selama petahana menjabat. Pasangan Zainal Abidin dan Anshori Djausal yang merupakan petahana, dianggap memiliki kinerja yang kurang baik oleh masyarakat. Kinerja yang buruk atau kurang baik memberikan kekecewaan terhadap masyarakat Lampung Utara, sehingga pada akhirnya masyarakat memberikan vonis dengan tidak memilihnya kembali di periode berikutnya.

BAB IV
PEMETAAN PENELITIAN ILMU
PEMERINTAHAN

A. GOVERMENT (G1)

G1 adalah *supreme authority* dalam arena pemerintahan seperti Negara. Pemerintah bukan pemimpin, penguasa, birokrasi, negara, atau sektor publik. Pemerintah adalah institusi pemegang kedaulatan rakyat bersama parlemen. Secara epistemologis, berbicara pemerintah tidak bisa dengan pendekatan legal formal dengan ala sarjana hukum, bukan juga memandang sebagai perangkat statis seperti dilakukan oleh institusionalisme dalam ilmu politik. Pendekatan institusionalisme bisa digunakan untuk mengkaji relasi pemerintah dengan negara, daerah, desa, swasta, warga, masyarakat dan lain-lain dalam pemerintahan hajat hidup orang banyak.

Tentu hasil kajian akan menunjukkan beragam tipe relasi kuasa, seperti yang sudah saya sampaikan di atas. Atau kita bisa juga menghadirkan narasi “kegagalan pembentukan pemerintah” antara lain

karena kuatnya birokrasi, teknokrasi dan populisme.

1	Makna	Struktur dan institusi pemerintahan (konstitusi, representasi, relasi, formasi)
2	Posisi Epistemologis	G1 umumnya menjadi objek studi yang didekati dengan politik, ekonomi politik, sosiologi, dll. G1 bisa juga menjadi perspektif, yang fokus pada institusi, untuk menjelaskan fenomena Sosial
3	Tema Makro	Pola institusi G1: demokrasi, birokrasi, teknokrasi, oligarki, populis, patrimonial, negara pegawai, negara administratif, negara peraturan, negara neoliberal, birokrasi representatif, negara korporatis, negara hadir. Pemerintahan langsung vs tidak langsung, divided vs unified, dll.
4	Konsep Meso-Mikro	Institusi, formasi, koalisi, kompetisi, kontestasi, oposisi, kolusi
5	Sebagai Objek	Sosok institusi pemerintahan dijelaskan dengan sosiologi, politik, antropologi, psikologi, govermentality, dll.

6	Sebagai Perspektif	Institusi pemerintahan sebagai perspektif untuk menjelaskan berbagai fenomena seperti ketimpangan, kemiskinan, kemakmuran, konflik, dll.
7	Metode	Rasionalisme, Konstruktivisme, Kontekstualisme
8	Arah dan Ilustrasi studi	Misal : (1) studi tentang defisit demokrasi lokal dengan sudut pandang yang beragam : dinasti, oligarki, klientelisme, korupsi, governability, dll. (2) studi tentang kepemimpinan populis disentuh dengan teori aktor rasional atau behaviorisme
9	Contoh studi	<ul style="list-style-type: none"> • Robert Putnam (1993) : modal sosial membuat demokrasi lokal, membuat layanan publik yang responsif dan pertumbuhan ekonomi • D. Acemoglu & J. Robinson (2012) : kemiskinan disebabkan oleh institusi pemerintahan yang ekstraktif dan kemakmuran disebabkan oleh institusi pemerintahan yang inklusif.

		<ul style="list-style-type: none"> • C. Geertz (1980) studi antropologi membuat konstruksi desa sebagai kolektivisme pluralistik. • C. Waren (1993) studi antropologi membuat konstruksi desa sebagai korporatisme masyarakat.
--	--	--

B. GOVERNING (G2)

Perbuatan pemerintah disebut governing (G2). G2 adalah sebuah konsep yang perlu dibedakan dengan konsep *ruling*, walaupun banyak ahli yang sering menyamakannya. Literatur pembeda ditulis oleh Steven A. Cook (2007) “*ruling but not governing*” (menguasai tetapi tidak memerintah). Literatur tersebut membahas tentang bagaimana dominasi militer dalam politik, atau bisa dikatakan bahwa kekuasaan dapat mengontrol seluruh lini atau ruang, tetapi tidak dapat memerintah (*governing*). Dalam hal ini *ruling* juga bisa dipahami sebagai kondisi yang tidak menjadi pemerintah, dalam artian tidak mengatur atau mengurus. Ada juga beberapa literatur yang menganggap antara *ruling* dengan

governing berbeda, di mana *ruling* sendiri bisa dilakukan. Konsep *governing* yang dipahami sebagai upaya untuk mengatur dan mengurus harus memiliki proses, fungsi dan hasil. *Governing* mengandung proses politik, hukum, dan administrasi. Pembentukan hukum dan kebijakan adalah perbuatan penting pemerintah dalam *governing*. Gagasan ideal dalam konteks ini adalah fungsi ekstraksi, distribusi, proteksi, dan koreksi yang dijalankan oleh pemerintah atas negara, warga dan masyarakat.

1	Makna	Perbuatan dan aktivitas memerintah. Ada yang pakai konsep menata (ordering)
2	Posisi Epistemologis	G2 memperluas obyek kajian ilmu pemerintahan. G2 umumnya bicara tentang “predikat” yang menyoal pada “obyek” luas (air, hutan, petani, beras, kemiskinan, pembangunan, dll). P-O itu bisa didekati dengan institusi G1, G4, & G5
3	Tema Makro	G2 <i>the commons</i> , G2 <i>the poor</i> , G2 <i>the roads</i> , G2 <i>economy</i> , G3 <i>development</i>

4	Konsep Meso-Mikro	Reformasi, inovasi, proteksi, distribusi, provisi, alokasi, rekognisi, intervensi, imposisi, emansipasi, penetrasi, integrasi, privatisasi, represi, koersi, dll
5	Sebagai Objek	Bentuk perbuatan pemerintah dijelaskan dengan sosiologi, institusionalisme, <i>contentious politics</i> , kekuasaan elite, <i>governance</i> , <i>govermentality</i>
6	Sebagai Perspektif	Belum berdiri sendiri sebagai perspektif untuk interpretasi dan eksplanasi
7	Metode	Rasionalisme, Konstruktivisme, Kontekstualisme
8	Arah dan Ilustrasi studi	Misal : studi tentang pemerintah memerintah dana desa; memerintah kaum miskin, memerintah desa, memerintah hutan, dll. Ini bisa didekati dengan ilmu sosial, maupun institusionalisme, <i>governance</i> , dan belakangan sangat membanjir studi dengan <i>Govermentality</i>

9	Contoh studi	<ul style="list-style-type: none"> • M. Grindle (2007): reformasi pemerintahan lokal karena hadirnya kepemimpinan wirausaha. • C. Van Luebke (2009) : reformasi pemerintahan lokal karena insentif politik pemimpin lokal. • E. Ostrom (1990) : Pengelolaan sumber daya bersama melalui institusi kolaborasi komunitas bisa mencegah tragedi bersama, sekaligus membuahkan kemakmuran dan konservasi, ketimbang institusi regulasi negara dan institusi privatisasi pasar bebas. • KJ Meier dkk (2019) : reformasi telah gagal karena kegagalan institusionalisasi politik. Lembaga-lembaga politik gagal memberikan tujuan kebijakan yang jelas, jarang mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk menangani ruang lingkup masalah, dan tidak membiarkan birokrasi otonomi yang cukup dalam implementasi.
---	--------------	---

C. GOVERNABILITY

Kemunculan *governability* berangkat dari diskursus tentang krisis demokrasi yang berkembang di Amerika Serikat dan Eropa, bersamaan dengan krisis kapitalisme karena beberapa hal seperti perang teluk yang berkepanjangan, harga minyak yang melambung tinggi, serta tuntutan kepada pemerintah semakin besar namun kapasitas pemerintah mengalami penurunan. Sebelum mengenal *governability*, ilmu politik sering mempelajari kapasitas sistem politik David Easton dan Gabriel Almond, yang sebenarnya hanya cocok dalam tradisi pluralis-liberal di Amerika Serikat dan kurang cocok diterapkan di negara lain. Bersamaan dengan munculnya konsep *governability* pada tahun 1975, berangsur-angsur muncul teorisasi tentang kapasitas negara. Negara menjadi kontestasi beragam sudut pandang, yaitu negara sebagai institusi dan berbicara kapasitas serta otonomi negara. Lalu muncul neoliberalisme yang memunculkan merek dagang yaitu “negara gagal” atau jualan krisis demokrasi (*government failure, state failure*). Setelah mendiagnosis penyakit, Barat “menjual obat” ke

Selatan dan Timur seperti konsep *good governance*. Semua ini tidak bisa mengobati kapasitas pemerintah.

Governabilitas, yang berkaitan dengan otoritas pemerintah, dipahami pada mulanya dengan posisi vitalitas demokrasi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an yang menghasilkan peningkatan substansial dalam aktivitas pemerintahan dan penurunan substansial dalam otoritas pemerintahan. Pada awal tahun 1970-an orang Amerika secara progresif menuntut dan menerima lebih banyak keuntungan dari pemerintah mereka, namun memiliki kepercayaan yang kurang terhadap pemerintah mereka dibandingkan dengan satu dekade sebelumnya. Namun secara paradoks, hasil dari dorongan demokrasi ini dikaitkan dengan pergeseran keseimbangan relatif dalam sistem politik antara kemunduran, *input* lembaga pemerintah yang lebih bersifat politis dan dalam upaya mengumpulkan kepentingan (terutama partai politik dan kepresidenan). Di satu sisi pertumbuhan birokrasi, pengaturan dan pelaksanaan, lembaga, “keluaran” pemerintah, di sisi lain. Vitalitas demokrasi di tahun 1960-an menimbulkan pertanyaan tentang tata kelola demokrasi tahun 1970-an.

Perluasaan kegiatan pemerintah menimbulkan keraguan tentang *solvabilitas* ekonomi pemerintah. Penurunan otoritas pemerintah menimbulkan keraguan tentang solvabilitas politik pemerintah. Dorongan demokrasi adalah membuat pemerintah menjadi kurang kuat dan lebih aktif untuk meningkatkan fungsinya dan menurunkan otoritasnya. Governabilitas adalah soal keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan, antara otoritas dan demokrasi, antara pemerintah dan masyarakat, serta antara input politik dan output administratif (Samuel Huntington, 1975).

1	Makna	Otoritas dan kapasitas Memerintah
2	Posisi Epistemologis	G3 tidak terpisah dari G2. Fokusnya pada predikat pemerintah, yakni efektivitas penggunaan otoritas dan kapasitas pemerintah dalam memerintah objek tertentu.
3	Tema Makro	G1 <i>failure</i> , <i>state capacity</i> , <i>state failure</i> , kinerja G1, <i>quality organization</i> G1, dll

4	Konsep Meso- Mikro	Responsivitas, legitimasi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepercayaan, pelayanan, dll.
5	Sebagai Objek	Kapasitas (yang sukses dan gagal) pemerintah dijelaskan dengan berbagai perspektif ilmu sosial-politik, <i>governance, govermentality</i> .
6	Sebagai Perspektif	G3 bisa menjadi perspektif untuk menjelaskan kegagalan versus kesuksesan kebijakan pemerintah.
7	Metode	Positivisme, rasionalisme, kontekstualisme
8	Arah dan Ilustrasi studi	Misal : studi tentang kegagalan KUD, BUMDesa mangkrak, kemiskinan, ketimpangan, pelayanan publik yang buruk, kegagalan revitalisasi pertanian, dll. Tema ini didekati dengan ekonomi politik, institusi pemerintahan, <i>governance, govermentality</i>
9	Contoh studi	<ul style="list-style-type: none"> • Budi Winarno (2008) : Kegagalan Organisasi Lokal dalam Pembangunan Desa,

D. GOVERNANCE

Governance dibutuhkan dalam *governability* yang bersifat interaktif. Tetapi bukan *governance* dalam pengertian “*governance without government*” maupun *good governance*. Dua mantra ini bersifat normatif yang hendak “melubangi pemerintah negara”, dan secara keilmuan tidak sanggup memberi daya interpretasi dan ekplanasi terhadap praktik pemerintahan. Karena itulah, Giliberto Capano, Michael Howlett dan M Ramesh (2005) menyerukan “*bringing government back in*” untuk merespons kegagalan *governance*. Mereka memiliki argumen kuat untuk mendukung pandangan bahwa pemerintah terus memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan, dan bahwa jika fakta ini tidak dipertimbangkan maka persepsi resiko tata kelola (*governance*) ditambahkan pada pandangan yang normatif atau preskriptif tanpa basis empiris yang memadai. *Governance* tetap penting dalam pengertian *meta-governance* yang tidak bias teknokratik-neoliberal. Tentu bukan “*governance without government*” melainkan “*government with governance*”. Pemerintah tanpa *governance*, atau

interaksi dengan pihak luar, akan menjadi otokratik-birokratik seperti dunia perkantoran. Sebaliknya “*governance without government*” akan membuat pemerintahan seperti dunia pasar, sehingga *government making* untuk mencapai tujuan negara sulit diwujudkan.

1	Makna	Tata pemerintahan : interaksi antara pemerintah-negara dengan masyarakat sipil dengan masyarakat ekonomi
2	Posisi Epistemologis	G4 hadir sebagai obyek studi yang bisa disentuh dengan perspektif institusi, politik, sosiologi, ekonomi politik, dan G5. G4 juga bisa hadir sebagai perspektif untuk menyentuh G1, G2, dan G3.
3	Tema Makro	G4 anggaran, G4 air, G4 beras, G4 kebun, pemerintahan pasar, dll.
4	Konsep Meso-Mikro	Negosiasi, kolaborasi, konsolidasi, partisipasi, transparansi, responsivitas, rente, privatisasi, free rider, bandit, dll
5	Sebagai Objek	Sosoktata kelola dijelaskan dengan politik, sosiologi, ekonomi-politik, administrasi, <i>govermentality</i>
6	Sebagai Perspektif	<i>Governance</i> sebagai institusionalisme baru hadir sebagai perspektif atas fenomena pemerintahan dan fenomena sosial dan ekonomi-politik.
7	Metode	Rasionalisme, Konstruktivisme, Kontekstualisme

8	Arah dan Ilustrasi studi	<p>Misal: (1) studi yang melucuti diskursus dan praktik <i>good governance</i> dalam pemerintahan; (2) studi yang menemukan pola tata kelola keuangan desa; (3) studi tentang perspektif ekonomi politik tentang tata kelola kelapa sawit; dll (4) studi tentang akuntabilitas kepala daerah yang misalnya didekati dengan institusionalisme; (5) studi partisipasi semu dalam pembangunan; (6) studi tentang negara, masyarakat dan swasta dalam sengketa agraria; (7) studi tentang ekonomi-politik tata kelola desa Wisata</p>
9	Contoh studi	<ul style="list-style-type: none"> • Gianpaola Baiocchidan Ernesto Ganuza, <i>popular democracy the paradox of Participation (2016)</i>: menunjukkan bagaimana instrumen partisipatif menjadi lebih terfokus pada pembentukan opini publik dan jauh lebih tidak memperhatikan, atau mampu mempengaruhi, reformasi aktual.

E. GOVERNMENTALITY

Menurut *governmentality*, pemerintahan adalah seni. Pengarahan perilaku dengan moda penalaran yang diperhitungkan. Rakitan yang dibentuk oleh lembaga, prosedur, analisis dan refleksi, perhitungan dan taktik yang memungkinkan pelaksanaan bentuk kekuasaan yang sangat spesifik meskipun kompleks ini, yang memiliki target: populasi, sebagai bentuk pengetahuan utamanya: ekonomi politik, dan sebagai sarana teknis pentingnya: aparat keamanan (Thomas Lemke, 2002; Bob Jessop, 2007, Tania Li, 2007).

Governmentality mengandung kehendak, mentalitas (moda berpikir) dan rasionalitas memerintah untuk tujuan perbaikan. Dengan demikian, kita melihat bahwa pemerintahan adalah pemerintah dengan tujuan tertentu, berarti untuk tujuan ini, dan praktik-praktik tertentu yang harus mengarah pada tujuan ini. Menurut *governmentality*, memerintah bukan dengan politik, melainkan dengan teknologi. Setiap praktik pemerintahan untuk pengarahan perilaku melibatkan pihak berwenang, aspirasi, pemikiran terprogram, keahlian, penemuan atau penggunaan teknik dan teknologi. Mulai dari

statistik, perangkat teknis, cara berpikir teknis, hingga barang teknologi disebut sebagai teknologi pemerintahan. Dominasi bukanlah sumber utama untuk memegang kekuasaan atau mengeksploitasi asimetri, sebaliknya mereka adalah efek dari teknologi pemerintahan. Teknologi pemerintahan digunakan untuk sistematisasi, stabilisasi, dan pengaturan hubungan kekuasaan yang dapat menyebabkan atau mengawetkan dominasi. Ketika politik bergeser ke teknik dan teknologi pemerintahan, maka di situlah akan ditemukan kontradiksi dalam praktik pemerintahan. Para pengguna *governmentality* seperti James Ferguson hingga Tania Li menunjukkan praktik pemerintahan dan pembangunan yang anti-politik. Masalah hajat hidup orang banyak yang begitu kompleks, dan mengandung ketimpangan ekonomi politik, tidak dijawab secara politik melainkan dengan solusi teknis. Meskipun solusi teknis ini mempunyai niat baik, tetapi ia tidak mencapai tujuannya, kecuali malah mengawetkan ketimpangan. Dengan demikian, meskipun *governmentality* mempunyai argumen berbeda dengan pendekatan institusionalisme pemerintahan, tetapi pada hakekatnya

governmentality melucuti cara berpikir dan bertindak teknis (teknokrasi) dalam pemerintahan, sehingga secara institusional gagasan *bringing politics back in* dan *bringing government back in* menjadi penting dalam studi pemerintahan.

1	Makna	Rasionalitas, strategi, taktik, kalkulasi pemerintahan dan memerintah.
2	Posisi Epistemologis	Perspektif kritis temuan Michel Foucault yang didasarkan bahwa kekuasaan menyebar, termasuk bicara pengetahuan adalah kekuasaan. G5 sebagai perspektif atas G1, G2, G3 dan G4.
3	Tema Makro	<i>State G5, bureaucratic G5, democratic G5, depelopment G5, dll</i>
4	Konsep Meso-Mikro	Problematisasi, teknikalisisi, teknokratisasi, standarisasi, program proyek,
5	Sebagai Objek	G5 tidak sebagai obyek studi

6	Sebagai Perspektif	G5 adalah perspektif untuk membongkar kekuasaan dan kepentingan di balik rasionalitas pemerintahan, khususnya yang berasal dari kolonialisme, neoliberalisme, pengetahuan, keahlian, dan teknokrasi.
7	Metode	Postfoundasionalisme, analisis diskursus, etnografi
8	Arah dan Ilustrasi studi	Misal : (1) studi membongkar kontradiksi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; (2) studi tentang tirani teknokrasi dalam pemerintahan dan pembangunan, (3) studi tentang anti-politik pengembangan kapasitas DPRD; (4) studi tentang teknokratisasi dana desa; (5) studi tentang kontradiksi standarisasi pelayanan publik; (6) studi tentang paradoks data pemerintah;
9	Contoh studi	<ul style="list-style-type: none"> • James Ferguson (1990): pembangunan desa telah gagal memperbaiki kehidupan orang desa, sebab pembangunan adalah sebuah mesin anti politik yang berbentuk industri, ekspansi birokrasi dan depolitisasi. Tania Li (2012), pembangunan sebagai kehendak untuk memperbaiki masyarakat telah gagal mencapai tujuannya

		melainkan malah justru memunculkan konflik baru dan semakin menjerumuskan masyarakat dalam jurang konflik sosial dan kemiskinan. Selain parawali masyarakat punya kepentingan, kegagalan
--	--	--

		<p>Pembangunan karena ditangani dengan “teknikalisasi permasalahan”, yaitu upaya mereduksi dan meringkas persoalan-persoalan menjadi sehimpunan variabel yang mudah dipahami, terukur, dan secara teknis dapat direkayasa. Persoalan relasi kuasa, kepentingan dan kecenderungan politik, keterbatasan akses, terhadap sumber daya yang kesemuanya sangat bersinggungan dengan masalah ekonomi-politik, selalu diabaikan oleh pendekatan teknis.</p> <p>Suzan Ilcan dan Anita Lacey (2011), <i>Governing the poor</i> : memaparkan cara-cara penggambaran dan kuantifikasi yang digeneralisasi meminggirkan orang miskin dan pengalaman mereka. Program bantuan telah membentuk pemahaman baru tentang kemiskinan yang lebih banyak mengatur orang miskin melalui reformasi neoliberal daripada memberikan solusi adil terhadap kemiskinan.</p>
--	--	---

BAB V

MEMILIH DAN MENULISKAN REFERENSI

Teknik yang tepat memilih dan menuliskan referensi sangat penting dalam menyusun karya ilmiah. Adapun teknik yang tepat dalam memilih dan menuliskan referensi, karena memiliki tiga alasan: *Pertama*, referensi mendukung argumentasi penulis. Referensi yang dikutip tersebut harus selaras mendukung argumen penulis, sehingga referensi yang dikutip harus relevan dengan dan terpercaya sumbernya. *Kedua*, pembaca dapat melacak sumber yang dikutip. Oleh karena itu teknik memilih dan menuliskan kutipan menjadi penting, karena hal ini mengidentifikasi kepada kualitas penulis, apakah penulis mengutip buku, jurnal atau dokumen yang mendukung argumen dan terpercaya (?). *Ketiga*, penulis terhindar dari plagiasi. Dengan merujuk pengutipan yang benar sesuai Standar Internasional, maka dia terhindar dari plagiasi, karena sumber data yang dikutip dicantumkan dalam teks atau daftar pustaka.

Kaidah penulisan untuk kutipan dan referensi dalam panduan ini menggunakan standar **HARVARD-**

APA STYLE. Berikut ini panduan dan contoh penulisan untuk kutipan dan berbagai jenis referensi.

A. Cara Penulisan Sumber Kutipan

ii. Sumber kutipan ditulis di awal kalimat atau awal teks:

A. Satu sumber kutipan dengan satu penulis: Asyik (2006) menyatakan bahwa.....; jika disertai dengan halaman: Asyik (2006: 289) menyatakan bahwa.....; Menurut Asyik (2006: 289)

B. Satu sumber kutipan dengan dua penulis: Cooper dan Schlinder (2003: 24)

C. Satu sumber kutipan lebih dari dua penulis: Guan *et al.* (2009: 32)

iii. Sumber kutipan ditulis di akhir kalimat atau awal teks:

- A. Satu sumber kutipan dengan satu penulis: (Asyik, 2006); jika disertai dengan halaman:
- (Asyik, 2006: 289).
- B. Satu sumber kutipan dengan dua penulis: (Cooper dan Schlinder, 2003: 24).
- C. Satu sumber kutipan lebih dari dua penulis: (Guan *et al.*, 2009: 32).
- iv. Dua sumber kutipan dengan penulis yang sama: John (2006,2007); jika tahun publikasi sama: Sumiyana (2007a, 2007b).
- v. Sumber kutipan berupa banyak pustaka dengan penulis yang berbeda-beda: (Yermack, 1997; Aboody dan Kasznik, 2000; Guan *et al.*, 2000).
- vi. Sumber kutipan tidak menyebut nama penulis, tetapi menyebut suatu lembaga atau badan tertentu: Badan Pusat Statistik (2006); Ikatan Akuntan Indonesia (2011); Financial

Accounting Standard Board (1984).

- vii. Sumber kutipan tidak menyebut nama penulis, tetapi menyebut suatu peraturan atau undang-undang: Undang-Undang No.12 Tahun 2012. ; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010.....; Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45.....
- viii. Kutipan berasal dari sumber kedua: Scott (2000) dalam Asyik (2009: 23) ; Arthur Levitt (lihat Riharjo, 2008: 21) ; Andayani (2002) seperti dikutip Herlina (2009: 16).... [Catatan: daftar pustaka hanya mencantumkan referensi yang merupakan sumber kedua].

B. Aturan Penulisan Daftar Pustaka/Referensi

- ix. Sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam DaftarPustaka, dan sebaliknya.
- x. Literatur yang dicantumkan dalam

Daftar Pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan dan dikutip dalam karya ilmiah.

- xi. Daftar pustaka ditulis/diketik satu spasi, berurutan secara alfabetis tanpa nomor.
- xii. Jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dulu, kemudian diikuti singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah, dilanjutkan penulisan tahun, judul dan identitas lain dari literatur/pustaka yang dirujuk.
- xiii. Jika penulis lebih dari dua orang, nama penulis pertama ditulis seperti aturan “d”, dilanjutkan penulisan nama penulis kedua dan seterusnya sebagai berikut: nama depan dan nama tengah (disingkat) dilanjutkan nama belakang. [Untuk penulis kedua dan seterusnya, penulisan nama depan/tengah (singkatan) dan nama belakang tidak perlu dibalik seperti penulis pertama].

- xiv. Penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan *et al.* sebagai pengganti nama penulis kedua dan seterusnya (berbeda dengan penulisan sumber kutipan seperti dijelaskan pada aturan 2.1 huruf e)
- xv. Kata penghubung seorang/beberapa penulis dengan penulis terakhir menggunakan kata “dan” (tidak menggunakan simbol “&”; serta tidak menggunakan kata penghubung “and” walaupun literturnya berbahasa Inggris, kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris).
- xvi. Cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda, bergantung pada jenis literatur/pustaka yang menjadi referensi.

C. Penulisan Daftar Pustaka

- xvii. Buku Teks
Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama

tengah (jika ada), tahun penerbitan, *judul buku* (cetak miring), edisi buku, nama penerbit, kota penerbit. [Jika ada dua penulis atau lebih, lihat aturan 2.2 huruf e).

Contoh:

Merna T. dan F. F. Al-Thani. 2008. *Corporate Risk Management*. 2nd ed. John Welly and Sons Ltd. England.

Wiley, J. 2006. *Contemporary Financial Management*. 3rd ed. Mc. GrowHill. Los Angeles.

Yaya, R., A.E. Martawireja, dan A. Abdurahim. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Salemba Empat. Jakarta.

- xviii. Buku Teks Terjemahan
Aturan penulisan: nama belakang penulis asli, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada), tahun penerbitan, *judul buku asli* (cetak miring), edisi/cetakan, nama penerbit, kota penerbit, nama penerjemah, tahun, *judul*

buku (cetak miring), edisi/cetakan, nama penerbit, kota penerbit. [Jika ada dua penulis atau lebih, lihat aturan 2.2 huruf e).

Contoh:

Baudrillard, J. 1970. *La Société de Consommation*. Nottingham Trent University. Clifton Lane, Nottingham. Terjemahan J.P. Mayer dan B.S.

Turner. 1998. *The Consumer Society: Myths and Structures*. Sage Publication Inc. Thousand Oaks. London.

Cresswell, J.W. 2008. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Third Edition. Sage Publication. California. Terjemahan A. Fawaid. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Cetakan 1. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Kieso, D.E., J.J. Weygandt, dan T.D. Warfield. 2007. *Intermediate Accounting*.

Twelfth Edition. John Wiley & Sons, Inc. USA. Terjemahan E. Salim. 2008. *Akuntansi Intermediate*. Edisi Kedua belas. Jilid 2. Erlangga. Jakarta.

- xix. Buku Terbitan Lembaga/Badan/Organisasi
Aturan penulisan: nama
lembaga/badan/organisasi, tahun
penerbitan, *judul buku* (cetak miring),
edisi/cetakan, nama penerbit, kota
penerbit.

Contoh:

Badan Pusat Statistik. 2013. *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi*. Januari. BPS Jawa Timur. Surabaya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Cetakan 1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Bagian Hukum Kepegawaian. Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2009. *Laporan Tahunan 2009: Perjuangan*

Melawan Korupsi Tak Pernah Berhenti.

KPK. Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara RI. 2012.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga

Administrasi Negara RI Tahun 2011.

LAN. Jakarta.

- xx. Buku Terbitan Lembaga/Badan/Organisasi (Berisi Himpunan Peraturan, UU, dan sejenisnya) Aturan penulisan: nama lembaga/badan/organisasi, tahun penerbitan, *judul peraturan/UU yang dirujuk* (cetak miring), nomor atau seri peraturan/UU, edisi/cetakan, nama penerbit, kota penerbit.

Contoh:

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2011.

Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

No. 58 (Revisi 2009). DSAK-IAI.

Jakarta.

International Accounting Standard Board (IASB). 2004. *Financial Instruments: Disclosures and Presentation*. International Accounting Standard No. 32. UK-IASB. London.

Financial Accounting Standard Board (FASB). 2000. *Using Cash Flow Information and Present Value in Accounting Measurement*. Statement of Financial Accounting Concept No. 7. FASB. Norwalk.

Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VII Jawa Timur. 2012. *Sistem Pendidikan Nasional*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Sub-Bagian Akreditasi dan Publikasi Kopertis VII. Surabaya.

Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VII Jawa Timur. 2012. *Standar Nasional Pendidikan*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. Sub-Bagian

Akreditasi dan Publikasi Kopertis VII.
Surabaya.

- xxi. Peraturan, Undang-Undang, dan sejenisnya (cetak lepas, tidak berupa buku himpunan) Aturan penulisan: nomor dan tahun peraturan/UU, *judul peraturan/UU yang dirujuk* (cetak miring), tanggal pengesahan/penerbitan (jika ada), nomor lembaran negara (jika ada), organisasi penerbit (jika ada), kota tempat pengesahan/penerbitan.

Contoh:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *Sistem Pendidikan Nasional*. 8 Juli 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 *Standar Nasional Pendidikan*. 16 Mei 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Jakarta.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 58 (Revisi 2009) *Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.

International Accounting Standard No. 32 (2004)

Financial Instruments: Disclosures and Presentation. International Accounting Standard Board. United Kingdom. London.

Statement of Financial Accounting Concept No. 7 (2000) *Using Cash Flow Information and Present Value in Accounting Measurement*. Financial Accounting Standard Board. Norwalk.

- xxii. Artikel dalam Jurnal
Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada), tahun penerbitan, judul artikel, *nama jurnal* (cetak miring), volume dan nomor jurnal (nomor jurnal

dalam tanda kurung), nomor halaman artikel dalam jurnal. [Jika ada dua penulis atau lebih, lihat aturan 2.2 huruf e).

Contoh:

Riduwan, A. 2010. Etika dan Perilaku Koruptif dalam Praktik Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 14(2): 121-141.

Riduwan, A., I. Triyuwono, G. Irianto, dan U. Ludigdo. 2010. Semiotika Laba Akuntansi: Studi Kritisal-Posmodernis Derridean. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 7(1): 38–60.

Veronica, S. dan Y. S. Bachtiar. 2005. The Role of Governance in Preventing Misstated Financial Statement. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 2(1): 159–173.

xxiii. Artikel Seminar/Simposium (dalam Prosiding)

Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada), tahun penerbitan, *nama*

prosiding (cetak miring), nomor dan volume prosiding (jika ada), tanggal seminar/simposium, *penerbit prosiding* (jika ada, cetak miring), nomor halaman artikel dalam prosiding. [Jika ada dua penulis atau lebih, lihat aturan 2.2 huruf e).

Contoh:

Dewi, A. R. 2003. Pengaruh Konservatisme Laporan Keuangan Terhadap Earnings Response Coefficient. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi VI Surabaya. Universitas Airlangga*: 119-159.

Fidiana, I. Triyuwono, dan A. Riduwan. 2012. Zakah Perspectives as a Symbol of Individual and Social Piety: Developing Review of the Meadian Symbolic Interactionism. *Global Conference on Business and Finance Proceedings* 7(1). January 3-6. *The Institute of Business and Finance Research*: 721-742

xxiv. Artikel Seminar/Simposium (cetak lepas)
Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada), tahun penerbitan, *nama seminar/simposium* (cetak miring), tanggal seminar/simposium, nomor halaman artikel. [Jika ada dua penulis atau lebih, lihat aturan 2.2 huruf e).

Contoh:

Kalana, I., S. Ngumar, dan I.B. Riharjo. 2012. Independensi Auditor Berbasis Kultur dan Filsafat Herbert Blumer. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*. 20-23 September: 1-25.

Riduwan, A. 2012. Realitas dalam Cermin Retak: Laba Akuntansi dalam Bingkai Penafsiran Praktisi Bisnis Non-Akuntan (Studi Hermeneutika-Kritis). *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*. 20-23 September: 1-22.

xxv. Artikel dalam Buku Antologi dengan Editor

Aturan penulisan: nama belakang,

singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada), tahun penerbitan, judul artikel, *judul buku* (cetak miring), nama editor buku, penerbit, kota penerbit. [Jika ada dua penulis atau lebih, lihat aturan 2.2 huruf e).

Contoh:

Azra, A. 2005. Pluralisme Islam Dalam Perspektif Historis. Dalam *Nilai-Nilai Pluralisme Islam: Bingkai Gagasan Yang Berserak*. Editor M. Sururin. Cetakan 1. Penerbit Nuansa. Bandung.

Barth, M.E. 2004. Fair Values and Financial Statement Volatility. Dalam *The Market Dicipline Across Countries and Industries*. Editor C. Borio, W.C. Hunter, G.G. Kaufman, dan K. Tsatsaronis. MIT Press. Cambridge.

xxvi. Skripsi/Tesis/Disertasi

Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada), tahun, judul

skripsi/tesis/disertasi,
skripsi/tesis/disertasi (cetak miring),
nama program studi dan/atau perguruan
tinggi, kota tempat perguruan tinggi.

Contoh:

Natsir, M. 2008. Studi Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia Melalui Jalur Suku Bunga, Jalur Nilai Tukar, dan Jalur Ekspektasi Inflasi Periode 1990:2-2007:1. *Disertasi*. Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Surabaya.

Samsi, N. 2012. Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan dengan kepatuhan Etika Auditor sebagai Variabel Pemoderasi. *Tesis*. Program S2 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.

Verdanasari, E. F. 2012. Pengaruh Penerapan Corporate Governance

terhadap Nilai Perusahaan dengan Kualitas Laba sebagai Variabel Intervening. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.

Williams, J.W. 2002. Playing the Corporate Shell Game: The Forensic Accounting and Investigation Industry, Law, and the Management of Organizational Appearance. *Dissertation*. Graduate Programme in Sociology. York University. Toronto. Ontario.

xxvii. Artikel dari Internet
Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada), tahun, judul, *alamat e-mail* (cetak miring), tanggal dan jam unduh.

Contoh:

Himman, L.M. 2002. A Moral Change: Business Ethics After Enron. San Diego University

Publication.<http://ethics.sandiego.edu/LMH>

/oped/Enron/index.asp. 27 Januari 2008
(15:23).

Yahya, H. 2005. Realitas dan Pancaindra
Anda. *http://www.pesanharunyahya.com*
dan *info@harunyahya.com*. 27 Januari
2008 (14:35).

xxviii. Makalah Pidato Ilmiah dan semacamnya
Aturan penulisan: nama belakang,
singkatan (inisial) nama depan dan nama
tengah (jika ada), tahun, judul,
sifat/tujuan makalah (cetak miring), nama
kegiatan, tanggal kegiatan, kota tempat
kegiatan.

Contoh:

Raka, G. 2003. Menggarisbawahi Peran
Idealisme, Karakter dan Komunitas dalam
Transformasi Institusi. *Makalah Orasi
Ilmiah*. Sidang Terbuka Senat Peringatan
Dies Natalis ke-44 Institut Teknologi
Bandung. 2 Maret. Bandung.

Takwim, B. 2005. *Habitus: Perlengkapan dan Kerangka Panduan Gaya Hidup. Makalah Diskusi Panel. Extension Course Resistensi Gaya Hidup. Forum Studi Kebudayaan Institut Teknologi Bandung. 20 Mei. Bandung.*

xxix. Artikel dari Majalah atau Surat Kabar
Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada), tahun, *judul artikel* (cetak miring), nama majalah/surat kabar, tanggal, halaman, kota penerbit.

Contoh:

Mangunwijaya, Y.B. 1992. *Pendidikan Manusia Merdeka*. *Harian Kompas*. 11 Agustus. Halaman 15. Jakarta.

xxx. Berita dari Majalah atau Surat Kabar
Aturan penulisan: nama majalah/surat kabar, tahun, *judul berita* (cetak miring), nomor dan/atau volume (jika ada), tanggal, halaman, kota penerbit.

Contoh:

Koran Tempo. 2002. *Belajar dari Skandal Enron*. 5 Februari. Halaman 21. Jakarta
Majalah Tempo. 2002. *Jatuhnya Enron*.
No. XXXVIII. 23 Januari. Halaman 18.
Jakarta

D. Penulisan Daftar Pustaka Jika Penulis Sama

Nama penulis yang sama untuk beberapa pustaka/literatur yang berbeda tidak perlu ditulis berulang-ulang, tetapi nama tersebut diganti dengan simbol “_____” (garis bawah/ *underline*). Hal ini berlaku pula untuk penulisan lembaga/badan/organisasi.

Contoh:

Aboody, D., M.E. Barth., dan R. Kasznik.
1999. Revaluation of Fixed Assets and Future
Firm Performance: Evidence from the UK.
Journal of Accounting and Economics 26:
149-178.

_____,_____, dan_____. 2006. Do
Firms Manage Stock-based Compensation

Expenses Disclosed under SFAS 123?
Journal of Accounting Research 24(3): 165-182.

Financial Accounting Standard Board (FASB). 1978. *Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises*. Statement of Financial Accounting Concept No. 1. FASB. Norwalk.

_____. 1980a. *Qualitative Characteristics of Accounting Information*. Statement of Financial Accounting Concept No. 2. FASB. Norwalk.

_____. 1980b. *Accounting and Reporting by Defined Benefit Pension Plans*. Statement of Financial Accounting Standards No. 107. FASB. Norwalk.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2011a. *Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan*

Operasi yang Dihentikan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 58 (Revisi 2009). DSAK-IAI. Jakarta.

_____. 2011b. *Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 4 (Revisi 2009). DSAK-IAI. Jakarta.

International Accounting Standard Board (IASB). 2004a. *Financial Instruments: Disclosures and Presentation*. International Accounting Standard No. 32. UK-IASB. London.

_____. 2004b. *Share-based Payment*. International Financial Reporting Standard No. 2. UK-IASB. London.

International Accounting Standard Committee (IASC). 1989. *Framework of the Preparation and Presentation of Financial Statements*. UK-IASC. London.

Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VII Jawa Timur. 2012a. *Sistem Pendidikan Nasional*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Sub-Bagian Akreditasi dan Publikasi. Kopertis VII. Surabaya.

_____. 2012b. *Standar Nasional Pendidikan*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. Sub-Bagian Akreditasi dan Publikasi. Kopertis VII. Surabaya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*. 28 Januari 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23. Jakarta.

_____ Nomor 19 Tahun 2005 *Standar Nasional Pendidikan*. 16 Mei 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Jakarta.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 (Revisi 2010) *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.

_____. No. 55 (Revisi 2011) *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.

Riduwan, A. 2010. Etika dan Perilaku Koruptif dalam Praktik Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 14(2): 121-141.

_____.2012. Realitas dalam Cermin Retak: Laba Akuntansi dalam Bingkai Penafsiran Praktisi Bisnis Non-Akuntan (Studi Hermeneutika-Kritis). *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*. 20- 23 September: 1-22.

_____,I. Triyuwono, G. Irianto, dan U. Ludigdo. 2010. Semiotika Laba Akuntansi:

Studi Kritis- Posmodernis Derridean.
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia
7(1): 38–60.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2012 *Pendidikan Tinggi*. 10
Agustus 2012. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Jakarta.

_____ Nomor 14 Tahun 2005 *Guru dan*
Dosen. 30 Desember 2005. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157.
Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. 2006. *Economic Origins of Dictatorship and Democracy*. Cambridge University Press.
- Bahrudin. 2010. “Runtuhnya Fondasi Holeinarei di Tanah Sentani: Agama, Uang, dan Kesejahteraan,” dalam *Pencitraan Adat Menyikapi Globalisasi*. Twikromo (ed). Yogyakarta: Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada.
- Baiocchi, G., & Ganuza, E. 2016. *Popular Democracy: The Paradox of Participation*. Stanford University Press.
- Bogdan, R. C., Biklen, S. K., 1992, *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn & Bacon
- Capano, Giliberto. Michael Howlett dan M Ramesh. 2005. “Bringing Governments Back in: Governance and Governing in Comparative Policy Analysis”. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 17 (4).
- Cook, Steven. 2007. *Ruling But not Governing: The Military and Political Development in Egypt, Algeria, and Turkey*. Baltimore: JHU Press.
- Crème, Phyllis, dan Mary Lea. 2008. *Writing at University: A Guide for Students*. New York: Open University Press.

- Eko, Sutoro. 2021. Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan. *Jurnal Governabilitas Volume 2 Nomor 1* Juni 2021.
- Ferguson, J. 1990. *The Anti-Politics Machine: 'development', depoliticization and bureaucratic power in Lesotho*. CUP Archive.
- Friedman, Sharon, dan Stephen Steinberg. 1989. *Writing and Thinking in Social Sciences*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Geertz, C. 1976. *The Religion of Java*. London: The University of Chicago, Press Ltd.
- Geertz, C. (1980). *Negara*. Princeton University Press.
- Huntington, Samuel. "The United State", dalam M.J Crozier, S. Huntington, J. Watanuki, 1975 *The Crisis of Democracy. Report on the Governability of democracies to the Trilateral Commission*. New York: New York University Press.
- Ilan, S., & Lacey, A. 2011. *Governing the Poor: Exercises of Poverty Reduction, Practices of Global Aid*. McGill-Queen's Press-MQUP.
- Jessop, Bob. 2007. "From Micro-Powers to Governmentality: Foucault's Work on Statehood, State Formation, Statecraft and State Power" in *Political Geography* 26

- Kane, S. Thomas. 2000. *The Oxford Essential Guide to Writing*. New York: Berkley Books.
- Lele, G dkk. 2010. *Panduan Penulisan Akademik*. Yogyakarta : Fisipol UGM.
- Lemke, Thomas. 2002. “Foucault, Governmentality, and Critique”. *Rethinking Marxism*. 14 (3).
- Li, Tania. M. 2007. “Governmentality” in *Anthropologica*, 49(2).
- Pitkin, H. F. 1967. *The Concept of Representation*. University of California Press.
- Ostrom, Elinor. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. 1994. *Making Democracy Work*. Princeton University Press.
- Shambazy, B. 2007. “Cerita tentang Mimpi Amerika”, dalam *Obama Menerjang Harapan: Dari Jakarta Menuju Gedung Putih*. Jakarta: Ufuk Press.
- Swales, John, dan Christian Feak. 2009. *Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills*. 2 edition. Michigan: the University of Michigan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI N0.17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Link Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa

www.online-student-resources.suite101.com/

https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style

[www.google](http://www.google.com) cendekia.com



Program Studi Ilmu Pemerintahan S-1 STPMD “APMD”

Terakreditasi A

Jl. Timoho No, 317, Yogyakarta

Telpon (0274) 561971

WhatsApp: 0812 3197 4440; Facebook: Prodi Ilmu

Pemerintahan STPMD “APMD”; Youtube : Ilmu

Pemerintahan STPMD

Email : ip@apmd.ac.id

[Website : http://ip.apmd.ac.id](http://ip.apmd.ac.id)

<http://jurnal.apmd.ac.id/index.php/governabilitas>



Program Studi Ilmu Pemerintahan S-1
STPMD “APMD”

Terakreditasi A

Jl. Timoho No, 317, Yogyakarta

Telpon (0274) 561971

☎ : 0812 3197 4440;

📘 : Prodi Ilmu Pemerintahan

📺 YouTube : www.youtube.com/watch?v=8qt4mfiWuTo

✉ email : governabilitas@apmd.ac.id

governabilitas@gmail.com

Website : <http://ip.apmd.ac.id>